

**ANALISIS PENGARUH *TRANSFER PAYMENT* TERHADAP
PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN PADA PEMERINTAHAN
JKW-JK (STUDY KASUS KABUPATEN PAK-PAK BHARAT
KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE SUMATERA UTARA)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Meperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Ekonomi Pembangunan



Oleh:

Nama : Nurhidayati Tumangger

NPM : 1505180030

Program Studi :Ekonomi Pembangunan

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA

MEDAN

2019



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : **DANI BAYU DARA**
NPM : **1505160144**
Program Studi : **MANAJEMEN**
Judul Skripsi : **PENGARUH PENGEMBANGAN KARIR DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN KOTA MEDAN (STUDI KASUS PADA KOLAM RENANG DELI)**

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(HAZMANAN KHAIR PSB, SE, MBA, Ph.D)

Penguji II

(MUHAMMAD ANDI PRAYOGI, SE, M.Si)

Pembimbing

(PERYS LAHUKHODRINST, SE, M.Si C.Hi)

Panitia Ujian

Ketua

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, SE, M.Si)



Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : DANI BAYU DARA
NPM : 1505160144
Program Studi : MANAJEMEN
Konsentrasi : MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
Judul Penelitian : PENGARUH PENGEMBANGAN KARIR DAN
DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA
KARYAWAN PADA PERUSAHAAN DAERAH
PEMBANGUNAN KOTA MEDAN (STUDI KASUS
PADA KOLAM RENANG DELI)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019

Pembimbing

PERYS LAILI KHODRI NST, SE, M.Si, C.Ht

Disetujui Oleh :

Ketua Program Studi Manajemen

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

JASMAN SARIPUDDIN HASIBUAN, S.E, M.Si

H. JANURI, S.E, M.M, M.Si



SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : DAMI BAYU DARA
NPM : 1505160144
Konsentrasi : MSDM
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi/Perpajakan/Manajemen/Ekonomi Pembangunan)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
 - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing " dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan.....20.
Pembuat Pernyataan



NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : NURHIDAYATI TUMANGGER
 NPM : 1505180030
 Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
 Judul Skripsi : ANALISIS PENGARUH TRANSFER PAYMENT TERHADAP PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN PADA PEMERINTAHAN JKW-JK (STUDY KASUS KABUPATEN PAK-PAK BHARAT KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE SUMATERA UTARA)

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
16/2-19	Revisi Kuesioner & tunc ke kede dan dandi & Pembuatannya Baku		
10/2-19	Bab II awal dan Gamboran Umum Kawasan Geografis Kab. Pangrehan dan Revisi kji & Kawasan		
20/2-19	Revisi Bab IV & Kunderi Geografi dr Kab - ke dan Data		
6/3-19	Bab II tambahkan Demografi dan Ekonomi Kab Pangrehan		
11/3-19	Analisis Hasil dr nuncan masalah dan tujuan Penelitian		
12/3-19	Bab II awal sdh baik, tambah analisis Data dr kuesioner		
15/3-19	Sudah Ok. Ade sl diuji-ken		

Medan, Maret 2019
 Diketahui / Disetujui
 Ketua Program Studi
 Ekonomi Pembangunan

Pembimbing Skripsi

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS

Dr. PRAWIDYA HARAANI RS

ABSTRAK

Kemiskinan yang ada di Indonesia yaitu Perogram Keluarga Harapan atau yang disebut dengan (PKH Pada tahun 2007 pemerintah kembali membuat suatu program penurunan tingkat). Bentuk perogram ini adalah pemberian bantuan tunai (*cast transfer*) kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM) penerima bantuan. PKH bertujuan untuk memutuskan rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, merubah prilaku RTSM yang relatif mendukung terhadap penurunan kemiskinan serta mendukung dalam upaya mempercepat target *Millennium Development Goals* (MGDs). Di Kabupaten Pak-Pak Bharat Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe PKH dapat menurunkan tingkat kemiskinan serta dalam bidang pendidikan semakin bertambah dan kesehatan anak semakin jauh dari kekurangan gizi serta bagi ibu yang sedang hamil. Di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe juga banyak yang mendapatkan bantuan yang double seperti KIS,KIP,RASTRA. Di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe yang Penerima PKH sesuai dengan kriteria yang di tentukan TNP2K yang Penerima Keluarga Manfaat sesuai dengan kondisi ekonominya dan kondisi rumah yang di tempati meskipun ada satu sampel yang tidak sesuai dengan krietria TNP2K yang mempunyai kondisi rumah kramik dan mempunyai harta aset yang lumayan banyak tapi tetap mendapatkan PKH.

Kata kunci : Perogram Keluarga Harapan

KATAPENGANTAR



Assalamu'alaikumWr.Wb AlhamdulillahAllohiRobbil'alamiin. PujiSyukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan proposal yang berjudul "**ANALISIS PENGARUH *TRANSFER PAYMENT* TERHADAP PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN PADA PEMERINTAHAN JKW-JK (STUDY KASUS KABUPATEN PAK-PAK BHARAT KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE SUMATERA UTARA)**".Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabat dan seluruh pengikut Beliau yang insyaAllah tetap istiqomah hingga akhir zaman kelak, Amin. Dengan selesainya penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Adapun ungkapan terimakasih ini penulis tujukan kepada:

1. OrangTua Tercinta Almarhum Dermawan Tumangger dan Alamarhumah Kamedah Angkat. Yang saya sangat rindukan Beberapa tahun ini ”
Allahumaghfirli dunuubi waliwallidayya warhamhuma kama rabbayanii shagirol Walijami'il muslimina walmu, miniina wal mu, minaati, al ahyai-min hum wal amwat, bainana wa bainahum bilkhirot, robbighfir warham wa anta khoiro roohim, wa la haola wala quwwata ilaallah aliyyi adzim”
2. Kepada Kakak dan Abang Ipar saya Nurhasanah Tumangger sos dan Mora Joni Nainggolan sumber motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Terima kasih atas semua doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis sampai detik ini baik itu semangat maupun materi. Semoga suatu saat penulis dapat membalas kebaikan yang diberikan dan dapat membuat suatu kebanggaan.
3. Keluarga Saya (Seluruh anggota Keluarga), terimakasih sudah sering membantu penulis dalam segala hal.
4. Ibu Dr. Prawidya Hariani RS, selaku ketua Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Beserta sekaligus Dosen Pembimbing saya yang telah memberikan waktu,

dengan penuh kesabaran dalam membimbing, memotivasi dan mengarahkan penulis. Arahan dan bimbingan yang sangat bermanfaat untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.

5. Ibu Dra. Roswita Hafni, SE, M.Si, selaku sekretaris Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Seluruh Dosen matakuliah Prodi Ekonomi Pembangunan atas ilmunya yang bermanfaat, semoga dapat menjadi amalan diakhirat kelak.
7. Untuk orang terkasih (Muhammad zazuli), terimakasih telah banyak membantu dan member support dalam menyelesaikan skripsi ini serta senantiasa menemani penulis selama ini dalam canda tawa.
8. Untuk Shabat-sahabat saya yaitu geng Durjana:(Desi Aisyah),(Ewi Mulyani), (Siti Mahmuda), (Nursar iramadani), Terimakasih untuk ketulusan, menemani membantu dan member segala masukan serta selalu ada dalam member support kepada penulis, selalu menghilangkan kepenatan penulis dalam pembuatan skripsi ini.

9. Teman Seperjuangan Saya diMengerjain Skripsi (Meli rahmaliah), (Yuna Hasanah Berasa), (Laiga Asmara),(geng Durjana), terimakasih atas semua bantuan dan semangat yang diberikan kepada penulis selama berada jauh dari keluarga, sukses selalu menanti kita.
10. Teman- teman EP angkatan 2015 dan untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu, terimakasih yang terdalam untuk bantuan, dukungan, dan doanya. Semoga keberkahan dan kesuksesan selalu menyertai kita semua. Amin.
11. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu demi satu.
12. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan penulis dalam mencapai kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis mengharapkan semoga penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan pihak lain yang membutuhkan. TerimaKasih

Medan, Maret 2019

NURHIDAYATI TUMANGGER

ABSTRAK

Kemiskinan yang ada di Indonesia yaitu Perogram Keluarga Harapan atau yang disebut dengan (PKH Pada tahun 2007 pemerintah kembali membuat suatu program penurunan tingkat). Bentuk perogram ini adalah pemberian bantuan tunai (*cast transfer*) kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM) penerima bantuan. PKH bertujuan untuk memutuskan rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, merubah prilaku RTSM yang relatif mendukung terhadap penurunan kemiskinan serta mendukung dalam upaya mempercepat target *Millennium Development Goals* (MGDs). Di Kabupaten Pak-Pak Bharat Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe PKH dapat menurunkan tingkat kemiskinan serta dalam bidang pendidikan semakin bertambah dan kesehatan anak semakin jauh dari kekurangan gizi serta bagi ibu yang sedang hamil. Di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe juga banyak yang mendapatkan bantuan yang double seperti KIS,KIP,RASTRA. Di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe yang Penerima PKH sesuai dengan kriteria yang di tentukan TNP2K yang Penerima Keluarga Manfaat sesuai dengan kondisi ekonominya dan kondisi rumah yang di tempati meskipun ada satu sampel yang tidak sesuai dengan krietria TNP2K yang mempunyai kondisi rumah kramik dan mempunyai harta aset yang lumayan banyak tapi tetap mendapatkan PKH.

Kata kunci : Perogram Keluarga Harapan

KATAPENGANTAR



Assalamu'alaikumWr.Wb

Alhamdulillahirobbil'alamiin. Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan proposal yang berjudul **“ANALISIS PENGARUH TRANSFER PAYMENT TERHADAP PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN PADA PEMERINTAHAN JKW-JK (STUDY KASUS KABUPATEN PAK-PAK BHARAT KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE SUMATERA UTARA) “**.Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabat dan seluruh pengikut Beliau yang insya Allah tetap istiqomah hingga akhir zaman kelak, Amin. Dengan selesainya penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Adapun ungkapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. OrangTuaTercinta Almarhum Dermawan Tumangger dan Alamarhumah Kamedah Angkat. Yang saya sangat rindukan Beberapa tahun ini ”
Allahumaghfirli dunuubi waliwallidayya warhamhuma kama rabbayanii shagiro Walijami'il muslimina walmu, miniina wal mu, minaati, al ahya-i

min hum wal amwat, bainana wa bainahum bilkhpirot, robbighfir warham wa anta khoiro roohim, wa la haola wala quwwata ilaabillahi aliyyi adzim”

2. Kepada Kakak dan Abag Ipar saya Nurhasanah Tumangger sos dan Mora Joni Nainggolan sumber motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Terimakasih atas semua doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis sampai detik ini baik itu semangat maupun materi. Semoga suatu saat penulis dapat membalas kebaikan yang diberikan dan dapat membuat suatu kebanggaan.
3. Keluarga Saya (Seluruh anggota Keluarga), terimakasih sudah sering membantu penulis dalam segalahal. Beserta sekaligus Dosen Pembimbing saya yang telah memberikan waktu, dengan penuh kesabaran dalam membimbing, memotivasi dan mengarahkan penulis. Arahan dan bimbingan yang sangat bermanfaat untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
4. Ibu Dr.Prawidya Hariani RS, selaku ketua Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dra. Roswita Hafni, SE, M.Si, selaku sekertaris Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Seluruh Dosen matakuliah Prodi Ekonomi Pembangunan atas ilmunya yang bermanfaat, semoga dapat menjadi amalan diakhirat kelak.
7. Untuk orang terkasih (Muhammad zazuli), terimakasih telah banyak membantu dan memberi support dalam menyelesaikan skripsi ini serta senantiasa menemani penulis selama ini dalam candatawa.

8. Untuk Shabat-sahabat saya yaitu geng Durjana: (Desi Aisyah),(Ewi Mulyani),(Siti Mahmuda),(Nursari ramadani),Terimakasih untuk ketulusan, menemani membantu dan memberi segala masukan serta selalu ada dalam memberi support kepada penulis, selalu menghilangkan kepenatan penulis dalam pembuatan skripsi ini.
9. Teman SeperjuanganSaya di Mengerjain Skripsi(Meli rahmaliah), (Yuna Hasanah Berasa), (Laiga Asmara), (geng Durjana), terimakasih atas semua bantuan dan semangat yang diberikan kepada penulis selama berada jauh dari keluarga, sukses selalu menanti kita.
10. Teman- teman EP angkatan 2015 dan untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu, terimakasih yang terdalam untuk bantuan, dukungan, dan doanya. Semoga keberkahan dan kesuksesan selalu menyertai kita semua. Amin.
11. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu demi satu.
12. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan penulis dalam mencapai kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis mengharapkan semoga penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan pihak lain yang membutuhkan. TerimaKasih

Medan, Maret 2019

NURHIDAYATI TUMANGGER

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	14
1.3 Batasan Masalah Dan Rumusan Masalah.....	15
1.4 Tujuan Penelitian.....	15
1.5 Manfaat Penelitian	16
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 Landasan Teori	18
A. Tinjauan Tentang Program Keluarga Harapan	18
B. Konsep Program Keluarga Harapan.....	18
2.1.1 Pembangunan Ekonomi.....	22
2.1.2 Pengeluaran Pemerintah.....	35
2.1.3 Teori Kemiskinan.....	45
2.1.4 Jaring Pengaman Sosial.....	51
2.2 Pengertian Program Keluarga Harapan dan Tujuan Program Keluarga Harapan	56
2.2.1 Program Keluarga Harapan.....	56
2.2.2 Tujuan Program Keluarga Harapan.....	57
2.2.3 Penerima Program Keluarga Harapan	57

2.2.4 Pengertian Dampak.....	58
2.3 Penelitian Terdahulu.....	59
2.4 Kerangka Konseptual.....	61
2.4.2 Kerangka Penelitian.....	61
BAB III METODE PENELITIAN.....	62
3.1 Pendekatan Penelitian.....	62
3.2 Definisi Operasional.....	64
3.3 Tempat Dan Waktu Penelitian	62
3.4 Jenis Dan Sumber Data.....	63
3.5 Populasi Dan Sampel.....	65
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	66
3.7 Teknik Analisis Data	67
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	68
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Pak-Pak Bharat	68
4.1.1 Kondis Geografi	68
4.1.2 Kondisi Demografi	68
4.1.3 Gambaran Umum Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe	73
4.2 Analisi Penelitian	75
4.2.1 Analisis Deskriptif Perkembangan Kemiskinan Di Kabupaten Pak-Pak Bharat SUMUT	75
4.2.2 Efektivitas Perogram PKH Di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe ...	95
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	106
5.1 Kesimpulan	106
5.2 Saran	107

DAFTAR PUSTAKA.....	108
---------------------	-----

DAFTAR GAMBAR

2.1 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah.....	37
2.2 Kurva Penentuan Permintaan.....	40
2.3 Kurva Penawaran.....	41
2.4.1 Kerangka Prosedur Penelitian.....	61
4.1 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Berdasarkan Jenis Kelamin	79
4.2 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Berdasarkan Umur	80
4.3 Keluarga Penerima Manfaat Berdasarkan Status Pendidikan (suami)..	81
4.4 Keluarga Penerima Manfaat Berdasarkan Penghasilan/Bulan	82
4.5 Luas Bangunan Yang Ditempati	83
4.6 Jumlah Orang/RT Keluarga Penerima Manfaat	84
4.7 Jumlah Penerima PKH Dalam RT	85
4.8 Jumlah Tanggungan Anak SD KPM	86
4.9 Tanggungan Lansia	87
4.10 Status Kepemilikan Rumah KPM	88
4.11 KPM Dalam Mengeluarkan Biaya Pendidikan/Tahun	89
4.12 KPM Dalam Biaya Kesehatan/Tahun	90
4.13 Jumlah Tabungan Ibu RT KPM Dalam /Bulan	91
4.14 KPM Berdasarkan Kepemilikan Aset	92
4.15 KPM Berdasarkan Daya Listrik	93
4.16 KPM Berdasarkan Bahan Bakar Yang Digunakan Sehari-hari	94
4.17 KPM Berdasarkan Jenis Lantai Yang Digunakan	96
4.18 KPM Berdasarkan Jenis Dinding Yang Digunakan	97

4.19 KPM Berdasarkan Komsumsi Makanan	98
4.20 KPM Berdasarkan Informasi yang Didapatkan Tentang PKH	99
4.21 KPM Berdasarkan Kemampuan Membeli Pakaian/Tahun	100
4.22 KPM Berdasarkan Informasi yang Didapatkan Tentang PKH	101
4.23 KPM Berdasarkan Seleksi Mendapatkan PKH	102
4.24 KPM Berdasarkan Kesehatan	103
4.25 KPM Dana PKH Yang Diterima Masyarakat/RT	104

DAFTAR TABEL

1.1 Kriteria Miskin Menurut BPS.....	3
1.2 Indeks Dan Komponen Bantuan Tahun 2016	8
1.3 Data Keluarga Penerima Manfaat PKH	9
1.4 Tabel Persentase Kemiskinan SUMUT.....	11
2.1 Penelitian Terdahulu.....	58
3.1 Waktu Penelitian	60
4.1 Luas Wilayah Kabupaten Pak-Pak Bharat	70
4.2 Banyaknya Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Dikabupaten Pak-Pak Bharat	71
4.3 Data Bantuan Sosial (Bansos) PKH Kabupaten Pak-Pak Bharat Sumatera Utara	77

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan tarap hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan perkapita. Pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang mencakup perubahan struktural, sikap hidup, kelembangaan, selain mencakup peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidak merataan distribusi pendapatan dan pemberantasan kemiskinan. akibat adanya perbedaan dan keragaman potensi sumber daya alam, letak geografis, dan kualitas sumber daya manusia di berbagai wilayah Indonesia yang di ikuti dengan perbedaan kinerja setiap daerah telah menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah. MDGs adalah sebuah program pembangunan berkelanjutan dimana di dalamnya terdapat banyak tujuan dan target salah satunya merupakan agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk mensejahterakan manusia.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang dengan jumlah penduduk sekitar 266.794.980 juta jiwa. Indonesia memiliki jumlah wilayah 5.445.675 km² dengan jumlah daratan 1.904.596 km² dan lautan berjumlah 96.079,15 km². Kemiskinan di Indonesia merupakan fenomena dan masalah sosial yang terus menerus dikaji dan menjadi perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah. penyebab ketertinggalan dan penghambat dalam pembangunan suatu bangsa adalah tingginya angka kemiskinan. (www.bps.go.id 2017)

Kemiskinan juga dipicu oleh banyaknya masyarakat yang masuk dalam kategori pengangguran terselubung, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, tingkat pendidikan yang rendah. Dimana mereka tidak produktif dalam pekerjaannya (musiman) Pengangguran model tersebut menempati bagian yang cukup besar dalam lapisan masyarakat Indonesia, sehingga banyak keluarga indonesia masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sekali pun mereka bersetatus dalam bekeluarga.

Menurut Kuncoro (2003) Kemiskinan adalah sebagai ketidak mampuan untuk memenuhi standar hidup minimum, di mana pengukuran didasarkan pada konsumsi. Berdasarkan konsumsi ini, garis kemiskinan terdiri dari dua unsur yaitu (1) pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar, (2) jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Pemerintah Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa terdapat kebutuhan untuk membangun Program *social safety net* untuk menutupi penurunan daya beli mayoritas penduduk masyarakat yang tergolong miskin dan membantu masyarakat secara langsung serta masyarakat yang membutuhkan. Seperti program pendidikan perlindungan sosial untuk memelihara jasa pelayanan kepada masyarakat miskin dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Seperti program pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan kehamilan, dan makanan tambahan bagi bayi.

Dalam memberantas kemiskinan pemerintah di Indonesia membuat distribusi kebijakan *transfer payment*. *Transfer Payment* adalah distribusi

pengeluaran pemerintah untuk membantu Rumah Tangga Sangat Miskin di Indonesia melalui bantuan seperti salah satunya Perogram Keluarga Harapan, angka kemiskinan yang masih tinggi dan distribusi pendapatan belum merata. Perogram Keluarga Harapan adalah salah program yang paling efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan di indonesia.

Menurut Samuelson dan Nordhaus (1994:338) *transfer payment* merupakan salah satu jenis pengeluaran pemerintah yang dapat secara langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat adalah satu kebijakan *transfer payment* pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah kepada individu dan pembayara transfer pemerintah merupakan pengeluaran berupa subsidi atau tunjangan sosial.

Tabel 1.1

Kriteria Miskin Menurut Standar Badan Pusat Statistik

No	Indikator	Kriteria
1	Luas lantai bangunan tempat tinggal	Kurang dari 8 m ² / orang
2	Jenis lantai bangunan tempat tinggal	Tanah/ bambu/ kayu murahan/ semen kualitas rendah
3	Jenis tempat tinggal	Bambu/ rumbia/ kayu kualitas rendah/ tembok tanpa plaster
4	Fasilitas tempat buang air besar	Tidak punya/ bersama
5	Sumber penerangan utama	Bukan listrik
6	Bahan bakar untuk masak	Kayu bakar/ arang
7	Konsumsi daging /susu / ayam per minggu	Tidak pernah mengkonsumsi/ hanya satu kali dalam seminggu
8	Sumber penerangan utama	Sumur/ mata air tidak terlindungi/ sungai/ air terjun
9	Pembelian pakaian baru untuk setiap rumah tangga dalam setahun	Tidak pernah membeli/ hanya membeli satu stel dalam setahun
10	Frekuensi makan dalam sehari untuk setiap anggota rumah tangga dalam setahun	Kurang dari dua kali dalam sehari

11	Lapangan pekerjaan anggota rumah tangga	Petani dengan luas lahan setengah hektar/ buruh tani/ kuli bangunan/ tukang batu/ tukang becak/ pemulung/ pekerja informal lainnya dengan pendapatan Rp.600.000- per bulan
12	Pendidikan kepala rumah tangga	Belum pernah sekolah/ hanya sampai jenjang SD dan tidak lebih
13	Kepemilikan asset / barang berharga minimal Rp.500.000-	Tidak mampu
15	Kemampuan berobat kepuskesmas/poliklinik	Tidak mampu

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS).go.id

Dalam rangka percepatan target menurunkan tingkat kemiskinan pemerintah mengandalkan implementasi dari intruksi pemerintah No 3 Tahun 2018 tentang pelaksanaan program bantuan langsung tunai (BLT), untuk rumah tangga sasaran (RTS), beras untuk rumah tangga miskin (RASKIN), kartu Indonesia pintar (KIP), kartu Indonesia sehat (KIS) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam rangka pengurangan subsidi BBM. Program Keluarga Harapan yaitu perogram pemberiann uang tunai kepada RSTM berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah di tetapkan serta melaksanakan kewajibanya. Program serupa yang telah dilaksanakan dan cukup berhasil di beberapa negara yang di kenal dengan *Conditional Cash Trasfers* (CCT) atau bantuan tunai bersyarat. Program Keluarga Harapan bukan kelanjutan Program Subsidi Langsung Tunai (BLT) yang di berikan kepada rumah tangga yang sangat miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM.

Program Keluarga Harapan merupakan program yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat guna mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas

sumber daya manusia di bidang ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan pada kelompok masyarakat miskin. Dalam Program Keluarga Harapan Terdapat dua jenis bantuan tunai yakni Bantuan Tunai Bersyarat atau *Conditional Cash Transfers* (CCT) dan tak bersyarat. Perbedaannya adalah bahwa bantuan tunai tak bersyarat merupakan bantuan bagi orang-orang/kelompok yang berbasis pada kriteria penerima yang sebelumnya sudah ditentukan (*pre-determined eligibility*). Transfer sosial semisal pensiun bagi warga yang sudah tua, hambatan fisik, anak-anak, dan lain-lain, merupakan bantuan tunai tanpa syarat yang lazim dijalankan pada berbagai negara.

Menurut Rawlings dan Rubio (2003), CCT adalah bagian dari program pengembangan generasi baru yang berusaha membantu akumulasi modal manusia (*human capital*) pada orang muda sebagai cara untuk peningkatan memutuskan siklus kemiskinan antar generasi. Seperti namanya, CCT memberikan uang kepada keluarga-keluarga miskin dengan persyaratan investasi modal manusia seperti menyekolahkan atau membawa anak ke pusat kesehatan secara reguler. Skema Bantuan Tunai Bersyarat ini memberikan uang tunai secara langsung kepada rumah tangga miskin sebagai tanggapan terhadap pemenuhan kondisi spesifik individu/rumah tangga misalnya kehadiran bersekolah, dan/atau pemeriksaan kesehatan, keikutsertaan dalam imunisasi dan semacamnya. Skema tersebut memberikan insentif bagi rumah tangga agar menyesuaikan perilakunya dengan tujuan sosial yang ditetapkan secara Nasional.

Di Indonesia program semacam ini salah satunya dikenal sebagai Program Keluarga Harapan . Program Keluarga Harapan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengembangkan sistem perlindungan sosial di Indonesia.

Sasaran PKH adalah Rumah RTSM yang sesuai kriteria Program Keluarga Harapan yakni: ibu hamil, ibu menyusui, memiliki anak balita dan anak usia sekolah setingkat SD-SMP. PKH dijalankan sebagai pelaksanaan dari UU No. 40 Tahun 2004 tentang jaminan sosial nasional, UU No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, Inpres No. 3 Tahun 2010 tentang rencana tindak percepatan pencapaian sasaran pro-rakyat, dan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan penanggulangan kemiskinan. Merujuk pada sistem jaminan sosial Nasional berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tersebut, PKH menjadi model jaminan yang unik. Disatu sisi, PKH merupakan bantuan sosial yang dimaksudkan demi mempertahankan kehidupan (*life survival*) dalam kebutuhan dasar terutama pendidikan dan kesehatan. Di sisi lain, PKH bernuansa pemberdayaan yakni menguatkan rumah tangga miskin agar mampu keluar dari kemiskinannya melalui promosi kesehatan dan mendorong anak bersekolah. Dana yang diberikan kepada RTSM secara tunai melalui Kantor Pos dimaksudkan agar penerima dapat mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan yakni anak-anak harus bersekolah hingga sekolah menengah pertama, anak balita harus mendapatkan imunisasi, dan ibu hamil harus memeriksakan kandungan secara rutin (berkala).

Program Keluarga Harapan memang salah satu saja dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia dengan mengkampanyekan pembangunan manusia untuk meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat melalui program pemberian subsidi bersyarat, namun program ini dipandang sebagai penggerak perubahan pola pikir, sesuai dengan kondisi persyaratan yang diinginkan, yaitu memberikan kesempatan untuk memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk anak-anak RTSM.

Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target *Millennium Development Goals* (MDGs) tahun 2015 yakni pengentasan kemiskinan, perolehan pendidikan dasar seluruh dunia, mendorong kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan, pengurangan angka kematian anak-anak, meningkatkan kesehatan ibu, PKH mencakup 5 item yakni: (1) pengurangan penduduk miskin ekstrim dan kelaparan, (2) pencapaian pendidikan dasar, (3) kesetaraan gender, (4) pengurangan angka kematian bayi dan balita, dan (5) pengurangan kematian ibu menyusui.

Dalam komponen Program Keluarga Harapan terdapat komponen: (1) komponen kesehatan seperti: ibu hamil/nifas, anak usia dibawah enam tahun (2) komponen pendidikan seperti: SD, SMP, SMA, (3) Komponen kesejahteraan sosial seperti : disabilitas berat, lansia usia 70 tahun. Setiap penerimaan PKH diberikan kartu peserta sebagai bukti kepersyaratan adapun hak peserta PKH adalah mendapatkan bantuan tunai yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan program, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Upaya promotif dan preventif untuk menunjang jaminan kesehatan nasional PKH harus di lakukan dengan pendekatan inovatif berbasis sistem informasi data yang baik. Membutuhkan kompetensi tenaga dan fasilitas kesehatan tingkat dasar yang kuat dengan adanya PKH untuk mencegah penyakit bagi ibu hamil dan lansia. Melalui kesehatan dan pencegahan angka kesakitan dan pecegahan penyakit dengan adanya bantuan PKH bisa menurunkan kekurangan gizi buruk dan penyakit hipertensi bagi lansia.

Tabel 1.2

Indek dan Komponen Bantuan Tahun 2016

Skema bantuan	Ideks Bantuan perKASM/Tahun
Bantuan Tetap	Rp.500.000,-
Bantuan peserta PKH Dengan Komponen :	
a.Ibu hamil/Menyusui/nifas	Rp. 1.200.000,-
b.Bantuan anak usia dibawah 6 tahun	Rp. 1.200.000,-
c.Anak SD dan sederajat	Rp. 450.000,-
d.Anak SMP dan yang sederajat	Rp. 750.000,-
e.Anak SMA dan yang sederajat	Rp. 1.000.000,-
f.Bantuan penyandang disabilitas berat	Rp. 3.100.000,-
g.Bantuan lanjut usia 70 tahun keatas	Rp. 1.900.000,-

Sumber: SK Mentri Sosial RI 2016

Dana Program Keluarga Harapan di berikan pemerintah kepada masyarakat miskin masih ada yang salah gunakan oleh penerima bantuan untuk kebutuhan yang tidak penting misalnya : walaupun pengambilan dana dilakukan oleh ibu-ibu atau perempuan tertua yang ada dalam keluarga, tidak jarang kepala keluarga laki-laki sering menggunakan dana Penerima Keluarga Harapan untuk membeli rokok dan ibu-ibu juga salah menyalah gunakan bantaun Perogram Keluarga Harapan untuk membeli barang kebutuhanya sehari-hari.

Pemerintah mengeluarkan dana Perogram Keluarga Harapan pada tingkat nasional di bawah ini data penerima Perogram Keluarga Harapan dalam 34 Povinsi. Pemerintah berharap dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Tabel 1.3
Data Keluarga Penerima Manfaat PKHTahun 2018

Tingkat Nasional

No	Provinsi	Total KPM PKH Existing Fc Tahap I Tahun 2018	KPM PKH Perluasan Tahun 2018 Eligible	Peralihan		Total Kpm Pkh
				ABSOLUTE	ASPDB	
1	Aceh	162.578	144.455	650	387	308.070
2	Bali	48.852	24.883	800	1.081	75.616
3	Banten	212.184	106.463	1.250	513	320.410
4	Bengkulu	49.533	44.123	600	529	94.785
5	Di Yongyakarta	212.881	22.285	1.400	939	237.505
6	DKI Jakarta	65.238	1.308	1.250	754	68.550
7	Gorontalo	38.450	25.164	600	137	64.351
8	Jambi	55.799	54.650	700	715	111.864
9	Jawa Barat	1.081.140	552.641	1.750	2.084	1.637.615
10	Jawa Tengah	948.955	589.191	1.700	2.578	1.542.424
11	Jawa Timur	1.163.269	582.992	1.700	1.859	1.749.820
12	Kalimantan Barat	79.747	78.499	1.100	641	159.987
13	Kalimantan Selatan	67.542	45.663	1.100	705	115.010
14	Kalimantan Tengah	30.193	20.982	800	105	52.080
15	Kalimantan Timur	36.630	33.209	690	209	70.738
16	Kalimantan Utara	8.251	6.373	110	50	14.784
17	Kepulauan Bangka Belitung	13.427	10.483	350	147	24.407
18	Kepulan Riau	19.860	21.463	350	110	41.783
19	Lampung	212.567	261.313	800	929	475.609

20	Maluku	61.286	41.875	900	309	104.370
21	Maluku Utara	22.809	15.688	650	85	39.232
22	NusaTenggara Barat	207.954	110.839	700	974	320.467
23	NusaTenggara Timur	228.435	159.930	1.450	1.042	390.857
24	Papua	28.921	80.237	450	109	109.717
25	Papua Barat	22.055	20.683	250	121	43.109
26	Riau	83.005	84.137	600	115	167.857
27	Sulawesi Barat	35.886	27.613	350	143	63.992
28	Sulawesi Selatan	175.296	136.701	1.250	1.173	314.420
29	Sulawesi Tengah	81.122	76.959	700	504	159.285
30	Sulawesi Tenggara	69.478	55.935	750	261	126.424
31	Sulawesi Utara	59.045	44.717	950	248	104.960
32	Sumatra Barat	99.300	94.188	1.150	1.116	195.754
33	Sumatera Selatan	190.300	139.085	850	871	331.106
34	Sumatera Utara	312.726	134.905	1.300	957	449.888
Grand Total		6.184.714	3.849.632	30.000	22.500	10.086.846

Sumber:kemensos.go.id (2018)

Pada tabel penerimaan Program Keluarga Harapan tahun 2018 jumlah yang paling tinggi penerimaan Program Keluarga Harapan di Provinsi Jawa Timur dengan total Keluarga Penerima Manfaat PKH 1.749.820 dan yang paling terendah penerima Program Keluarga Harapan berada di Provinsi Kalimantan Utara dengan total 14.784. Dari 34 provinsi di Indonesia sumut berada di tingkat ke empat pada total jumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH pada tingkat nasional.

Dalam data Keluarga Penerima Manfaat Perogram Keluarga Harapan tahun 2018 berjumlah total 449.888 dari tingkat Nasional di Sumatera Utara Program Keluarga Harapan berkontribusi besar bagi penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia. Untuk itu dari besaran jumlah keluarga miskin Sumatera Utara yang telah di tetapkan oleh kementrian RI menjadi peserta Program Keluarga Harapan pada tahun 2017 dari kepala dinas provinsi Sumatera Utara ada 300,025 KK atau sekitar 1,5 jiwa akan di apresiasi dan menurunkan tingkat kemiskinan di Sumatera Utara. (Dinsos RI 2017).

Tabel 1.4

Tabel Persentase Kemiskinan Sumatera Utara

NO	Kabupaten/ Kota	Persentase/%		
		2015	2016	2017
1	Nias	18,05	17,64	18,11
2	Mandailing Natal	11,13	10,98	11,02
3	Tapanuli Selatan	11,37	11,15	10,60
4	Tapanuli Tengah	52,20	14,58	14,66
5	Tapanuli Utara	11,41	11,25	11,35
6	Toba Samosir	10,21	10,08	10,19
7	Labuhan Batu	8,99	8,95	8,89
8	Asahan	12,09	11,86	11,67
9	Simalungun	10,96	10,81	10,65
10	Dairi	9,09	8,90	8,87
11	Karo	9,68	9,81	9,97
12	Deli Serdang	4,74	4,86	4,62
13	Langkat	11,30	11,36	11,15
14	Nias Selatan	19,05	18,60	18,48
15	Humbang Hasudutan	9,85	9,78	9,85
16	Pak-Pak Bharat	11,26	10,72	10,53
17	Samosir	14,11	14,40	14,72
18	Serdang Bedagai	9,59	9,53	9,30
19	Batu Bara	12,61	12,24	12,48
20	Padang Lawas Utara	10,97	10,87	10,70
21	Padang Lawas	8,73	8,69	9,10
22	Labuhanbatu Selatan	11,65	11,49	11,63
23	Labuhanbatu Utara	11,31	10,97	11,28
24	Nias Utara	32,62	30,92	29,06

25	Nias Barat	29,96	28,36	27,23
	Kota			
26	Sibolga	13,48	13,30	13,69
27	Tanjung Balai	15,08	14,49	14,46
28	Pematang Siantar	10,47	9,99	10,10
29	Tebing Tinggi	12,03	11,70	11,90
30	Medan	9,41	9,30	9,11
31	Binjai	7,03	6,67	6,75
32	Padang Sidempuan	8,77	8,32	8,25
33	Gunung Sitoli	25,42	23,43	21,66

Sumber: BPS Survey Sosial Ekonomi Nasional 2015-2017

Program keluarga harapan di Sumatera Utara di berlakukan pada tahun 2008 yang meliputi 33 kabupaten/kota yakni Medan, Dairi, Pak-Pak Bharat sebagai daerah percontohan. Kabupaten Pak-Pak Bharat adalah pecahan dari Dairi. Kabupaten Pak-Pak Bharat di jadikan salah satu daerah sasaran Program Keluarga Harapan mengingat jumlah penduduk miskin di daerah ini masih cukup banyak. menurut Badan Pusat Statistik jumlah penduduk miskin di kabupaten Pak-Pak Bharat sebanyak 10,53% yang tersebar dalam 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara. kondisi rumah tangga miskin.

Program Keluarga Harapan (PKH) di kabupaten Pak-Pak Bharat di berlakukan pada tahun 2008, Pak-Pak Bharat dijadikan salah satu daerah sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) mengingat jumlah penduduk yang miskin di daerah Pak-Pak Bharat masih cukup banyak. menurut badan pusat statistik (BPS) jumlah penduduk miskin berjumlah 2.274 jiwa orang miskin yang tidak dapat mengakses pendidikan dan kesehatan yang sangat layak. Pak-Pak Bharat merupakan salah satu yang mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan pada pemerintahan JKW-JK . Jumlah penduduk Kabupaten Pak-Pak Bharat 38.77 jiwa

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk yang dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2010, jumlah penduduk di Kabupaten Pak-Pak Bharat adalah sebesar 40.505 jiwa yang terdiri dari 20.468 jiwa penduduk laki-laki dan 20.037 jiwa penduduk perempuan. Sebanyak 40.505 penduduk Kabupaten Pak-Pak Bharat menyebar di delapan Kecamatan dan 52 desa, persentase terbesar berada di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe (23,12%) sedang persentase terkecil ada di Kecamatan Pagindar (2,99%). Jika dibandingkan dengan data penduduk tahun 2009 terjadi perbedaan jumlah penduduk yang cukup signifikan. Penjelasan sebagai berikut: setelah berdiri sendiri, di Kabupaten Pak-Pak Bharat belum pernah dilakukan pendataan penduduk lengkap (*door to door*) seperti Sensus Penduduk (SP). Hal ini dikarenakan pelaksanaan Sensus Penduduk dilakukan pada tahun berakhir 2010. Untuk jumlah penduduk dilakukan proyeksi berdasarkan hasil SP Kabupaten Dairi sebagai kabupaten induk. Bila dibandingkan dengan luas Kabupaten Pak-Pak Bharat (1218,30 Km²), maka rata-rata tingkat kepadatan penduduknya mencapai 33 jiwa per km². *Sex ratio* Kabupaten Pak-Pak Bharat sebesar 102,15%. Ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari jumlah penduduk perempuan. Dari distribusi penduduk menurut kelompok umur, terlihat bahwa penduduk Kabupaten Pak-Pak Bharat tergolong penduduk kelompok usia muda karena sebesar 39,96% penduduk berumur kurang dari 15 tahun. Dan sebanyak 56,25% merupakan penduduk usia produktif (usia 15 s/d 64 tahun). Angka *sex ratio* menurut kecamatan terbesar berada di Kecamatan Pagindar dan yang terkecil berada di Kecamatan Salak.

Program Keluarga Harapan di Kabupaten Pak-Pak Bharat sebanyak 2.274 rumah tangga yang menerima Perogram Keluarga Harapan atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sebagai penerima PKH setiap Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM) pasti memiliki karateristik yang berbeda-beda pemanfaatanya. ada juga rumah tangga tidak termasuk dapat bantuan PKH namun secara kondisi fisik rumah tangga lebih di butuhkan dari pada yang penerima bantuan PKH sebelumnya yang terdaftar sehingga dikawatirkan terjadi ketidak tepat sasaran.

Setiap pengurus rumah tangga miskin PKH di dominasi oleh kaum ibu-ibu rumah tangga yang rata-rata berpendidikan rendah bahkan tidak bisa membaca atau buta dan menulis tetapi semangat para ibu-ibu rumah tangga pada mengikuti pertemuan bisa di bilang cukup baik. meskipun mereka tidak berpendidikan tetapi mereka di beri arahan untuk tidak membiarkan anak-anak mereka ikut terbelenggu dan jauh dari dunia pendidikan sehingga kelak bisa memiliki masa depan yang lebih baik.

Diharapkan dengan adanya Program Keluarga Harapan ini dapat meningkatkan kualiatas hidup mereka melalui kesehatan dan pendidikan yang nantinya di harapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan yang selama ini menjerat Rumah Tangga Sangat Miskin(RSTM).

Berdasarkan uraian di atas maka sipenulis tertarik untuk mengangkat judul **“Analisis Pengaruh Transfer Payment Terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan Pada Pemerintahan JKW-JK (Studi Kasus Kabupaten Pak-Pak Bharat Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Sumatera Utara)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian di atas, maka indentifikasi masalah yang dapat diambil dalam penelitian adalah:

1. Sumber daya manusia yang masih kurang terampil menyebabkan kemiskinan yang masih sangat tinggi
2. Jumlah penduduk miskin pak-pak bharat masih cukup besar
3. Diperkirakan penyaluran Program Keluarga Harapan tidak tepat sasaran

1.3 Batasan Masalah dan Rumusan masalah

1.3.1. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya terbatas metode evaluasi tentang kebijakan penurunan tingkat kemiskinan pada penerima Program Keluarga Harapan di Kabupaten Pak-Pak Bharat Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe pada periode pemerintahan JKW-JK.

1.3.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan indikator kemiskinan di Indonesia pada PKH di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pak-Pak Bharat Sumatera Utara tahun 2018.
2. Bagaimana efektifitas dari program PKH di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pak-Pak Bharat Sumatera Utara.

1.4 Tujuan penelitian

1. Melakukan analisis deskriptif terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pak-Pak Bharat.
2. Melakukan evaluasi dengan cara mengukur efisiensi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pak-Pak Bharat.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Akademik

1. Bagi mahasiswa

Menambah wawasan, ilmu pengetahuan dan sebagai bahan referensi penelitian untuk mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir.

2. Bagi Penelitian

untuk menambah wawasan pengetahuan mengenai analisis pengaruh *transfer payment* terhadap tingkat kemiskinan pada pemerintahan JKW-JK dan untuk memberikan saran atau keritikan bagi pemerintah terhadap penurunan tingkat kemiskinan pada Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pak-Pak Bharat Kec, Sitellu Tali Urang Jehe.

1.5.2 Manfaat Non Akademik

a. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam merumuskan program pengaruh transfer payment terhadap penurunan tingkat kemiskinan pada Program Keluarga Harapan sehingga mampu memberikan kebijakan yang berkesinambungan.

b. Bagi Masyarakat

Agar menumbuhkan rasa sadar masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dan pendidikan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menurunkan tingkat kemiskinan pada Kabupaten Pak-Pak Bharat Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

A. Tinjauan Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)

Konsep kesejahteraan sosial merupakan tujuan akhir dari ketercapaiannya Program Keluarga Harapan. Dengan dilaksanakannya Program Keluarga Harapan ini diharapkan dapat meningkatkan taraf kehidupan sosial ekonomi, pendidikan, serta kesehatan masyarakat khususnya di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pak-Pak Bharat Sumatera Utara

B. Konsep Program Keluarga Harapan

1. Definisi Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat. Masalah kesejahteraan sosial tidak bisa ditangani oleh sepihak dan tanpa terorganisir secara jelas kondisi sosial yang dialami masyarakat perubahan sosial yang secara dinamis menyebabkan penanganan masalah sosial ini harus direncanakan dengan matang dan berkesinambungan. Karena masalah sosial akan selalu ada dan muncul selama pemerintahan masih berjalan.

Sedangkan menurut undang-undang No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan dan sosial mendefinisikan Kesejahteraan Sosial adalah kondisi

terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

2. Definisi Program Keluarga Harapan (PKH)

Salah satu kebijakan sosial yang dikembangkan oleh pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sebagai imbalannya RTSM diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target MDGs. Secara khusus, tujuan PKH terdiri atas:

- 1) Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM;
- 2) Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM;
- 3) Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas dan anak di bawah 6 tahun dari RTSM;
- 4) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi RTSM. RTSM yang menjadi sasaran PKH adalah sekelompok orang yang tinggal satu atap, baik yang terikat oleh pertalian darah (keluarga batih) maupun tidak (keluarga luas) yang memiliki pendapatan per kapita per bulan di bawah garis fakir miskin Rp. 92.192.

(Direktorat jaminan kesejahteraan sosial 2009: 10).

3. Ketentuan-ketentuan Program Keluarga Harapan

Penerima bantuan PKH adalah RTSM yang memiliki anggotakeluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas. Bantuan tunai hanya akan diberikan kepada RTSM yang telah terpilih sebagai peserta PKH dan mengikuti ketentuan yang diatur dalam program. Agar penggunaan bantuan dapat lebih efektif diarahkan untuk peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, bantuan harus diterima oleh ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan (dapat nenek, tante/bibi atau kakak perempuan). Untuk itu, pada kartu kepesertaan PKH akan tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga. Kepesertaan PKH tidak menutup keikutsertaan RTSM penerima pada program-program lainnya. Seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin (ASKESKIN), Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN), dan sebagainya. Kewajiban penerima PKH adalah sebagai berikut: 1) Berkaitan dengan kesehatan RTSM yang ditetapkan sebagai peserta PKH diwajibkan melakukan persyaratan berkaitan dengan kesehatan jika terdapat anggota keluarga terdiri dari anak 0-6 tahun dan/atau ibu hamil/nifas. Apabila terdapat anak usia 6 tahun yang telah masuk sekolah dasar, maka RTSM tersebut mengikuti persyaratan berkaitan dengan pendidikan. 2) RTSM yang ditetapkan sebagai peserta PKH diwajibkan melakukan persyaratan berkaitan dengan pendidikan jika terdapat anak yang berusia 6-15 tahun. Peserta PKH ini diwajibkan untuk mendaftarkan anaknya ke SD/MI atau SMP/MTS (termasuk SMP/MTS terbuka) dan mengikuti kehadiran di kelas minimal 85 persen dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung. (Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial 2009: 3).

4. Landasan Program Keluarga Harapan

Pada awalnya PKH dibawah menkokesra, namun mulai tahun 2010 berada dibawah sekretaris wakil Presiden (Sekwapres). PKH didasarkan pada Peraturan Presiden (perpres) No. 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, dan Intruksi Presiden (Impres) No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Peraturan Presiden (Perpres) No. 15 Thun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan memuat strategi dan program percepatan penanggulangan kemiskinan. Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan: (1) mengurangi pengeluaran masyarakat miskin, (2) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, (3) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha makro dan kecil, (4) mensinergikan kebijakan dan program penaggulangan kemiskinan.

Sedangkan program kemiskinan terdiri dari kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, kelompok penaggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, dan program-program lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin. Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan, memuat pelaksanaan program-program pembangunan yang berkeadilan, meliputi program pro rakyat, keadilan untuk semua (*justice for all*), dan pencapaian tujuan pembangunan millenium (*Millenium Development Goals- MDGs*). (Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial 2009: 17)

2.1.1 Pembangunan Ekonomi

Sadono Sukirno (1985:13) mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan yang terjadi secara terus-menerus melalui serangkaian kombinasi proses demi mencapai sesuatu yang lebih baik yaitu adanya peningkatan pendapatan perkapita yang terus menerus berlangsung dalam jangka panjang.

Todaro (1994) mengartikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup perubahan struktur, sikap hidup dan kelembagaan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan distribusi pendapatan dan pemberantasan kemiskinan. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses pembangunan yang terjadi terus-menerus yang bersifat dinamis. Apapun yang dilakukan, hakikat dari sifat dan proses pembangunan itu mencerminkan adanya terobosan yang baru, jadi bukan merupakan gambaran ekonomi suatu saat saja. Pembangunan ekonomi berkaitan dengan pendapatan perkapita dan pendapatan nasional. Pendapatan perkapita yaitu pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah sedangkan pendapatan nasional merupakan nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang diciptakan dalam suatu perekonomian di dalam masa satu tahun. Pertambahan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita dari masa ke masa dapat digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi dan juga perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah.

Menurut Malthus tidak menganggap proses pembangunan ekonomi terjadi dengan sendirinya. Malahan proses pembangunan ekonomi memerlukan berbagai usaha yang konsisten di pihak rakyat, memberikan gambaran adanya gerakan menuju keadaan stasioner tetapi menekankan bahwa perekonomian mengalami kemerosotan beberapa kali sebelum mencapai tingkat tertinggi dari pembangunan. Jadi, menurut Malthus, proses pembangunan adalah suatu proses naik turunnya aktivitas ekonomi lebih dari pada sekedar lancar tidaknya aktivitas ekonomi. Pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Pada bukunya *Principles of Political Economy*, Malthus lebih realistis dalam menganalisa pertumbuhan penduduk dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi dibandingkan pada bukunya *Essay of Population*. Pertumbuhan penduduk adalah akibat dari proses pembangunan. Sebagaimana ditulis Malthus : “Pertambahan penduduk tidak bisa terjadi tanpa peningkatan kesejahteraan yang sebanding.” Jika tingkat akumulasi modal meningkat, permintaan atas tenaga kerja juga meningkat. Kondisi demikian mendorong pertumbuhan penduduk.

Peranan produksi dan distribusi. Malthus menganggap produksi dan distribusi sebagai dua unsur utama kesejahteraan. Jika keduanya dikombinasikan pada proporsi yang benar, ia akan dapat meningkatkan kesejahteraan suatu negara dalam waktu singkat. Tetapi jika keduanya dijalankan secara terpisah atau dikombinasikan pada proporsi yang tidak benar maka akan diperlukan beberapa ribu tahun untuk meningkatkan kesejahteraan. Faktor-faktor dalam pembangunan ekonomi. Malthus mendefinisikan problem pembangunan ekonomi sebagai sesuatu yang menjelaskan perbedaan antara gross national product potential dan gross national product actual. Akumulasi modal merupakan faktor paling penting bagi

pembangunan ekonomi. Maltus mengatakan, “peningkatan kesejahteraan yang mantap dan berkesinambungan tidak mungkin tercapai tanpa penambahan modal secara terus menerus. Sumber akumulasi modal adalah laba. Maltus mengatakan : “kekayaan suatu negara pada umumnya diciptakan oleh tabunagan yang disisihkan dari keuntungan yang meningkat,dan sama sekali karna pengurangan pengeluaran pada barang-barang mewah dan barang-barang kesenangan.

Kekurangan permintaan efektif. Pandangan Malthus ini didasarkan pada merosotnya permintaan efektif dan pada penolakannya terhadap hukum pasar yang dikemukakan Say. Malthus tidak sependapat dengan Say yang mengatakan bahwa di dalam pasar tidak mungkin terjadi over produksi atau penawaran yang berlebihan. Menurutnya, tidak seluruhnya benar bahwa komoditi selalu dipertukarkan dengan komoditi.Stagnasi ekonomi. Maltus yakin penawaran buruh dalam jangka pendek sangat tidak elastis. Dia mengatakan “ karena sifat dasar penduduk, kebutuhan tambahan pekerja untuk memenuhi permintaan tertentu, tidak dengan segera tersedia di pasar, sampai selang waktu enam belas atau delapan belas tahun.” Tetapi persediaan modal dapat ditingkatkan lebih cepat.

Menurut Mill pembangunan ekonomi sebagai fungsi dari tanah,tenaga kerja,dan modal.Sementara tanah,tenaga kerja adalah 2 faktor produksi yang asli,modal adalah “persediaan yang dikumpulkan dari produk-produk tenga kerja sebelumnya”.Laju akumulasi modal merupakan fungsi dari bagian angkatan kerja yang dipekerjakan secara produktif. Konsumsi produktif adalah konsumsi untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan produktif masyarakat .

1. Pengendalian pertumbuhan penduduk

Yang dimaksudkan dengan penduduk hanyalah golongan kelas pekerja. Karena itu mill mengkhawatirkan pertumbuhan jumlah tenaga kerja produktif yang bekerja atas dasar upah.

2. Cadangan upah

Upah pada umumnya melebihi tingkat penghidupan minimum. Upah dibayarkan dari modal, upah dapat naik karena peningkatan cadangan modal yang dipakai untuk mengupah tenaga kerja atau karena pengurangan jumlah tenaga kerja. Jika upah naik penawaran tenaga kerja naik.

3. Laju akumulasi modal

Akumulasi modal tergantung pada jumlah dana yang dapat menghasilkan tabungan atau besarnya sisa hasil usaha dan kuatnya kecenderungan untuk menabung. Modal adalah hasil dari tabungan dan tabungan berasal dari penghematan konsumsi saat ini demi kepentingan konsumsi di masa datang. Serta tingkat laba cenderung akan menurun karena hasil yang semakin disektor pertanian dan bertambahnya penduduk berdasarkan laju Malthus. Akan tetapi kecenderungan menurunnya laba dapat di cegah dengan sejumlah faktor –faktor yaitu: kerugian modal pada masa krisis, perbaikan teknik, perkembangan perdagangan luar negeri, pinjaman pemerintah untuk pengeluaran yang tidak produktif, dan terakhir, dengan mengeksport modal ke negara jajahan stn untuk memproduksi barang konsumsi guna negara asal.

Dalam pembangunan ekonomi terdapat dua teori klasik dan neoklasik yaitu:

A. Teori klasik

Teori klasik secara ringkas kebijaksanaan pasar bebas. Ahli ekonomi klasik menyakini adanya prekonomian persaingan pasar sempurna dan pasar bebas yang secara otomatis bebas dari segala campur tangan pemerintah. Yang akan memaksimalkan pendapatan nasional. Pemupukan modal kunci ke arah kemajuan semua kaum klasik memandang pemupukan modal sebagai kunci ke arah kemajuan. Karena itu ditekankan betapa pentingnya tabungan dalam jumlah yang besar. Hanya pemilik modal dan pemilik tanah yang mampu untuk menabung, kelas pekerja tidak mampu menabung karena mereka hanya menerima upah yang besarnya sama dengan tingkat kebutuhan hidup minimal.

Keuntungan, Rangsang bagi investasi. Menurut kaum klasik, keuntungan merangsang investasi. Semakin besar keuntungan, semakin besar pula akumulasi modal dan investasi. Keuntungan cenderung menurun. Keuntungan tidak akan naik secara terus-menerus, namun cenderung menurun apabila persaingan untuk menghimpun modal antarkapitalis meningkat. Menurut Smith, alasannya ialah naiknya upah sebagai akibat persaingan antarkaum kapitalis. Sementara upah dan sewa naik karena naiknya harga jagung menurut Ricardo, keuntungan akan menurun.

Keadaan stationer semua para ahli ekonomi klasik pada akhir proses pemupukan modal. Sekali keuntungan mulai menurun, proses ini akan berlangsung terus sampai keuntungan menjadi nol, pertumbuhan penduduk dan pemupukan modal terhenti, dan tingkat upah mencapai tingkat kebutuhan hidup minima.

Malthus menunjukkan adanya korelasi khusus antara pertumbuhan penduduk dan persediaan makanan. Menurutnya, jika pertumbuhan penduduk di

biarkan tak terkendali, maka ia akan melampaui pertumbuhan modal dan juga sarana bagi kebutuhan hidup. Ricardo dan Malthus melihat pertumbuhan penduduk dan kemerosotan pertumbuhan modal sebagai akibat bekerjanya hukum “ hasil yang semakin menurun “, sebagian penghalang akhir pembangunan ekonomi.

Dalam garis besar, teori klasik pembangunan ekonomi dapat di nyatakan demikian. Misalkan kenaikan keuntungan yang di harapkan, dapat menaikkan investasi sehingga menambah stok modal yang telah ada dan mendorong penyempurnaan teknik. Kenaikan dalam pemupukan modal menaikkan jumlah cadangan upah. Sebagaimana akibatnya, upah naik. Upah yang lebih tinggi mengundang pertumbuhan penduduk, yang ,menyebabkan permintaan akan makanan menjadi naik. Produksi makanan ditingkatkan dengan menggunakan buruh dan modal tambahan. Tetapi hasil yang semakin menurun pada tanah akan mengakibatkan upah buruh menjadi naik. Akibatnya, harga jagung membumbung dan sebaliknya sewa naik, upah naik dan karena itu keuntungan mengurang. Penurunan keuntungan menandakan penurunan dalam investasi, menghambat kemajuan teknologi, mempersusut cadangan upah, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi penduduk dan pemupukan modal. “ Dalam model klasik, hasil akhir pembangunan kapitalistik adalah stagnasi. Stagnasi terjadi karena kecenderungan alamiah keuntungan untuk menurun dan sebagai konsekuensi lemahnya pemupukan modal.” Jika hal ini terjadi, pemupukan modal berhenti, penduduk mandek dan keadaan stationer terjadi.

Para pemikir dasawarsa 1950-an dan 1960-an memandang proses pembangunan sebagai serangkaian tahapan pertumbuhan ekonomi yang berurutan yang harus di lalui semua negara. Pada dasarnya adalah teori ekonomi pembangunan yang mensyaratkan adanya kuantitas serta kombinasi tabungan, investasi, dan bantuan luar negeri yang tepat agar negara-negara berkembang dapat bergerak di sepanjang jalur pertumbuhan sebagaimana sebelumnya negara-negara yang lebih maju. Dengan demikian, pembangunan menjadi sinonim dengan pertumbuhan ekonomi agregat yang berlangsung.

Dalam teori ini terdapat dua aliran yaitu: Aliran pertama, yang berfokus pada teori dan pola perubahan struktural, menggunakan teori ekonomi modern dan analisis statistik dalam upaya menggambarkan proses internal perubahan struktural yang harus di laksanakan negara berkembang “ pada umumnya “ agar berhasil menciptakan dan mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang pesat. Aliran kedua, revolusi ketergantungan internasional, lebih radikal dan politis. Aliran ini memandang keterbelakangan dalam kaitanya dengan hubungan internasional dan kekuasaan domestik, kekakuan lembaga dan struktur ekonomi, serta berkembang pesatnya dualisme kehidupan ekonomi dan masyarakat baik di dalam negeri maupun di antara negara-negara dunia. Penekanan diletakkan pada perlunya kebijakan baru dan utama memberantas kemiskinan, menyediakan kesempatan kerja yang lebih beragam dan mengurangi ketimpangan pendapatan.

B. Teori Neoklasik

Bagi negara maju kontrarevolusi neoklasik merupakan aliran dan kebijakan makro ekonomi yang lebih mementingkan sisi penawaran, teori ekspektasi nasional dan gelombang-gelombang swastanisasi perusahaan milik negara. Bagi negara berkembang, kontrarevolusi berarti pasar bebas dari campuran pemerintah dalam perekonomian nasional dan regulasi pemerintah terhadap kegiatan ekonomi. Menurut para tokoh kontrarevolusi neoklasik, campuran pemerintah dalam kegiatan ekonomi menyebabkan penurunan laju pertumbuhan ekonomi dengan adanya pasar bebas (*free market*) di mana naik atau turunnya harga barang maupun jasa bergantung pada permintaan dan penawaran di pasar.

Analisis pasar bebas (*Freemarket Analysis*) menyatakan bahwa pasar-pasar itu sendiri sudah efisien. Pasar produk memberikan sinyal terbaik tentang investasi dan kegiatan apa yang layak dikerjakan untuk mencapai keuntungan.

Teori pertumbuhan neoklasik tradisional model pertumbuhan Solow merupakan pengembangan dari formulasi Harrod Domar dengan menambahkan faktor yaitu tenaga kerja, serta memperkenalkan variabel independen dan faktor teknologi. Harrod Domar mengasumsikan skala hasil tetap (*konstant return to scale*) dengan koefisien baku, Solow berpegang pada konsep skala hasil yang terus berkurang (*diminishing return*) dari input tenaga kerja dan modal jika keduanya dianalisis terpisah. Jika bersamaan, Solow memakai skala hasil tetap.

Memakai fungsi produk agregat standar:

$$Y = K^\alpha (AL)^{1-\alpha}$$

Dimana :

Y= Produk domestik bruto.

K= Persediaan modal (yang mungkin termasuk SDM serta modal fisik).

L= Tenaga kerja.

A= Produktifitas tenaga kerja .

Menurut teori pertumbuhan neoklasik tradisional, hasil pertumbuhan output bersumber dari satu atau dari tiga

faktor : peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kerja (pertumbuhan penduduk dan pendidikan), peningkatan modal (melalui tabungan dan investasi) dan penyempurnaan teknologi.

C. Indikator pembangunan ekonomi

1. Urbanisasi

Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Alasan urbanisasi sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah sesuatu yang sederhana dapat disimpulkan. Apabila di perkotaan banyak penduduk desa yang banyak melakukan urbanisasi menandakan bahwa di perkotaan, segala sesuatunya menjamin kesejahteraan dan kemakmuran, biasanya konsep ekonomi yang diterapkan adalah konsep ekonomi makro. Seperti banyaknya kesempatan kerja yang didukung dengan peralatan mesin-mesin canggih, dan kebutuhan akan pemesanan yang sangat banyak , menyebabkan perusahaan yang membutuhkan pekerja yang baru. Dengan banyaknya

perusahaan yang membutuhkan pekerja maka semakin dapat menurunkan angka pengangguran sehingga menurunkan pula tingkat kemiskinan.

2. Pendapatan Per kapita

Pendapatan per kapita berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, maka akan berpengaruh pula pada pembangunan ekonomi. Alasan pendapatan per kapita sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pendapatan per kapita yang semakin naik disebabkan oleh stabilitas perekonomian yang bagus pula. Berarti itu menandakan kesejahteraan masyarakat terjamin. Apabila dikaitkan dengan urbanisasi pada poin 1, maka dari perusahaan yang membutuhkan banyak tenaga kerja, akan menarik banyak tenaga kerja yang bekerja di perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dari perusahaan. Sehingga, pemasukan perusahaan naik, dan dapat meningkatkan pendapatan dari perusahaan, yang selanjutnya berimbas kepada pekerjanya. Apabila pekerja menaikkan kualitas kerjanya, akan menaikkan pula permintaan sehingga naik pula pendapatan per kapita.

3. Struktur Ekonomi

Pembangunan ekonomi berkaitan dengan struktur ekonomi. Alasan struktur ekonomi sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah dengan berkembangnya pembangunan ekonomi maka akan berkembang pula struktur ekonomi. Struktur disini diartikan sebagai suatu pola perubahan yang menuju ke peningkatan. Contohnya dahulu kita berada pada sector pertanian, kemudian seiring dengan bertumbuhnya

ekonomi sektor pertanian digantikan dengan sector industry. Maka struktur ekonomi akan berubah seiring dengan bertumbuhnya ekonomi.

4. Angka Tabungan

Angka tabungan ini berhubungan dengan struktur ekonomi. Alasan angka tabungan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah bermula dari perubahan struktur ekonomi. Perubahan yang dimaksud adalah ketika sektor pertanian beralih ke sektor perindustrian maka tingkat produktifitas akan meningkat dan output yang dihasilkan juga akan naik, maka tabungan adalah modal dalam sebuah perekonomian, semakin banyak angka tabungan yang dimiliki dalam perubahan struktur ekonomi maka dapat disimpulkan bahwa perekonomian semakin berkembang

5. Indeks Kualitas Hidup

Secara umum kita mengetahui bahwa indeks kualitas hidup dibagi menjadi tiga bagian, yaitu angka rata-rata harapan hidup, angka kematian bayi dan angka melek huruf. Alasan indeks kualitas hidup sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah semakin baik indeks kualitas hidup maka semakin bagus pembangunan ekonomi yang dilaksanakan. Pertama dari angka rata-rata harapan hidup, apabila negara dalam keadaan pembangunan ekonomi yang baik maka angka rata-rata harapan hidup semakin meningkat dilihat dari pemenuhan kebutuhan makanan kepada masyarakat merata, karena mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri sehingga tidak ada kata tentang

kekurangan makanan., selain itu apabila sakit mereka terjangkau dalam pemenuhan kebutuhan obat-obatan ataupun akses kesehatan. Kedua adalah angka kematian bayi, pembnagunna ekonomi yang baik adalah ketika angka kematian bayi menurun. Hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya gizi, nutrisi, serta pelayanan kesehatan yang memadai mulai ibu hamil hingga bayi yang dilahirkan. Dan yang ketiga adalah semakin baik suatu pembangunan ekonomi adalah ketika angka melek huruf semakin meningkat karena itu menandakan fasilitas untuk memefasilitasi warga yang melek huruf semakin banyak dan memudahkan merak untuk melakukan komunikasi yang baik dengan adanya melek huruf terseut, sehingga masyarakat dapat memahami perkembangan dari suatu negara.

6. Indeks Pembangunan Nasional

Alasan Indeks Pembangunan Nasional sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah indeks inilah yang nantinya akan membandingkan indeks kualitas hidup dari suatu negara. Dari adanya indeks pembangunan nasional ini kita nanti akan mengetahui perkembangan pembangunan ekonomi kita berada dimana. Nantinya dari indeks pembangunan nasional ini dapat menjadi tolak ukur sudah sampai mana negara kita sekarang)

7. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indicator pembangunan ekonomi karena kita bisa melihat suatu negara memiliki pembangunanan ekonomi yang maju apabila tingkat pendidikan tinggi, yang dimaksud adalah dilihat dari angka melek huruf masyarakat disuatu negara, semakin banyak orang yang

melek huruf dalam suatu negara menandakan bahwa pembangunan ekonominya bagus. Bukan hanya dilihat dari angka melek hurufnya saja namun juga dari tingkat partisipasi masyarakat akan pentingnya pendidikan.

8. Kesehatan

Kesehatan juga turut berpengaruh, semakin lengkap fasilitas kesehatan yang ada, semakin mudah akses kesehatan yang ada akan mengakibatkan angka harapan hidup yang tinggi termasuk pelayanan KB (keluarga berencana), sehingga kesehatan menjadi alasan dijadikan indikator keberhasilan

9. Tempat tinggal

Indikator selanjutnya adalah tempat tinggal, tempat tinggal yang dimaksud adalah tempat tinggal yang mendapat fasilitas air , sarana sanitasi dan listrik yang memadai, dan memiliki kualitas tempat tinggal yang layak huni, yang menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

10. Kriminalitas

Apabila suatu negara memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi, maka berkuranglah tingkat kriminalitas, karena masyarakat sudah mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

11. Akses Media

Yang terakhir adalah akses media yang sampai menuju tempat yang tak terjangkau menandakan bahwa tingkat pembangunan ekonomi yang baik.

2.1.2 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah juga dapat di kelompokkan menjadi 2 yaitu teori makro dan teori mikro (Mangkoesoebroto, 1994)

A. Teori makro

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. (Suparmoko, 1987) Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut (Boediono, 1999)

- a. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa.
- b. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai. Perubahan gaji pegawai mempunyai pengaruh terhadap proses makro ekonomi, di mana perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung.
- c. Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. Transfer payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah dipasar barang melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga

untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis transfer payment mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai meskipun secara administrasi keduanya berbeda. (Boediono, 1999)

1. Teori Adolf Wager

Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. (Mangkoesobroto, 1994).

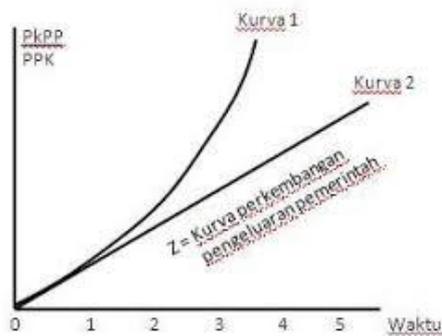
Berkaitan dengan hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnya fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan. Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\frac{PPkP}{PPK1} \frac{PkPPn}{PkPPn} < \frac{PkPPn}{PPKn}$$

PPkP : Pengeluaran pemerintah per kapita

PPK : Pendapatan per kapita, yaitu GDP/jumlah penduduk

1,2.....n : jangka panjang (tahun)



Sumber: Mangkoesubroto 1994

Gambar 2.1 pertumbuhan pengeluaran pemerintah menurut Wagner

Kurva diatas menunjukkan secara relative peranan pemerintah semakin meningkat. Teori Wager mendasarkan pandanganya pada suatu teori yang disebut *organic theory of state* yaitu teori organisasi yang mengagap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain

Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan n perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahapan-tahapan pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, menurut mereka rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional relatif besar. Hal ini dikarenakan pada tahap ini persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sehingga pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya.(Dumairy, 1997)

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Namun pada

tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. Selain itu, pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor yang semakin rumit. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri, menimbulkan semakin tingginya tingkat pencemaran udara dan air sehingga pemerintah harus turun tangan untuk mengatur dan mengurangi akibat negatif dari polusi itu terhadap masyarakat. Pemerintah juga harus melindungi buruh yang berada dalam posisi yang lemah agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. (Basri, 2005)

2. Teori Peacock dan Wiseman

Peacock dan Wiseman adalah dua orang yang mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Peacock dan Wiseman mengemukakan pendapat lain dalam menerangkan perilaku perkembangan pemerintah. Mereka mendasarkannya pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak. Padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar. (Mangkoesobroto, 1994)

Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana

masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena. Menurut Peacock dan Wiseman adalah pertumbuhan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. (Basri, 2005)

Dalam teori Peacock dan Wiseman terdapat efek penggantian (*displacement effect*) yaitu ada gangguan sosial yang menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Pengentasan gangguan ini tidak hanya cukup membiayai semata-mata dengan pajak sehingga pemerintah harus meminjam dana dari luar negeri. Setelah gangguan teratasi muncul kewajiban baru tersebut. Akan lebih lanjut adalah pajak tidak akan menurunkan kembali ketingkat semula meskipun gangguan telah berakhir.

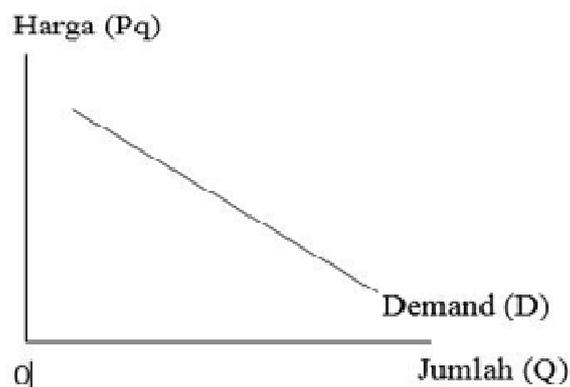
Selain itu, masih banyak aktivitas pemerintah yang baru kehilangan setelah terjadinya perang yang dan ini disebut efek inspeksi (*inspection effect*). Adanya gangguan sosial juga menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ketangan pemerintah yang sebelumnya dilaksanakan oleh pihak swasta. Efek inilah yang disebut dengan efek konsentrasi (*concentration effect*). Dengan adanya ketiga efek tersebut menyebabkan bertambahnya aktivitas pemerintah sehingga setelah perang selesai tingkat pajak tidak menurun kembali pada tingkat pajak sebelum perang.

B. Teori Mikro

Tujuan dari mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut. Selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain. Teori mikro mengenai pengeluaran pemerintah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Penentuan Permintaan

Gambar 2.2



Sumber: Mangoesuebroto 1994

$$U = I(G, X)$$

G = Vektor barang publik

X = Vektor barang swasta

i = Individu; $i = \dots, m$

U = Fungsi utilitas

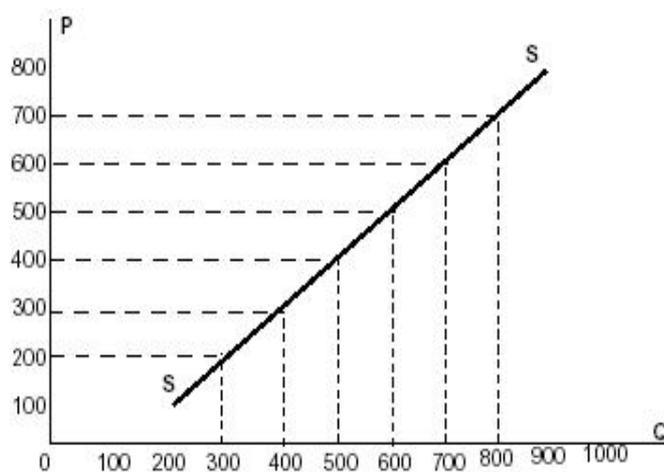
Perkembangan pengeluaran pemerintah dapat dijelaskan dengan beberapa faktor dibawah ini:

- 1.) Perubahan permintaan akan barang publik.
- 2.) Perubahan dari aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik, dan juga perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi.
- 3.)Perubahan kualitas barang publik.
- 4.)Perubahan harga faktor-faktor produksi.

2. Tingkat Output

Barang dan jasa publik yang disediakan pemerintah ditentukan oleh politisi yang memilih jumlah barang/jasa yang dihasilkan. Fungsi utilitas para politisi adalah sebagai berikut:

Gambar 2.3



Kurva Penawaran
Sumber: Mangkoesuebroto 1994

$$U_p = g(X, G, S)$$

Dimana :

U_p = Fungsi utilitas

S = Keuntungan yang diperoleh politisi dalam bentuk materi atau kedudukan

G = Vektor barang publik

X = Vektor barang swasta

Pengeluaran pemerintah menggambarkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Beberapa pengeluaran pemerintah yaitu:

C. Efek Harga Relatif

Melakukan redistribusi pendapatan dengan instrumen anggaran (APBN) melalui pemungutan pajak dan alokasi subsidi, Peran redistribusi pendapatan ini dapat di jalankan. Dengan diberikanya subsidi dan pajak pada target yang tepat, kebijakan tersebut akan mengarahkan redistribusi pendapatan yang lebih merata.

D. Pengeluaran Berupa Barang Publik

Pengeluaran pemerintah yang substansial adalah untuk menyediakan barang modal seperti infrastruktur jalan, listrik, air, dan barang publik karena barang publik ini akan berguna bagi banyak orang (warga). Sebesar apapun dana yang di himpun dan di alokasikan pemerintah dalam sisi pengeluaran jika pengeluaran pemerintah tidak di tujukan untuk meningkatkan prekonomian dan menyediakan

barang publik maka tidak akan banyak berarti. Seringkali pemerintah (termasuk pemda) mengalokasikan pengeluaran hanya untuk kepentingan pihak pemerintah sendiri misalnya alokasi belanja pegawai yang terlalu besar, belanja barang yang tidak banyak manfaatnya. Secara rata-rata, pengeluaran pemda yang dialokasikan untuk belanja pegawai tahun 2016 dari 500 kabupaten/kota/provinsi adalah sebesar 37% (kementerian keuangan,2016)

E.Efektivitas Subsidi

Subsidi adalah kebijakan yang di gunakan untuk melakukan redistribusi pendapatan dengan menambahkan daya ekonomi pada golongan tertentu. Subsidi adalah pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah kepada suatu perusahaan atau rumah tangga untuk, menyediakan atau mengkomsumsi suatu barang (komoditas). Tidak seperti barang publik subsidi tidak dikomsumsi atau di terima oleh setiap orang. Subsidi yang baik adalah subsidi yang diberikan pada target (individu/keluarga/unit usaha) yang pantas untuk menerima subsidi. Subsidi bisa diterapkan dengan cara diantaranya: 1. Melalui bantuan langsung tunai, 2. pemberian kupon untuk mendapatkan sejumlah komoditas tertentu misalnya kupon untuk pembelian beras, 3. Pemberian diskon pada komoditas tertentu.

F.Kebijakan Publik

Penigkatan Kesejahteraan menjadi salah satu target pemerintah melalui program penigkatan pada anggaran belanja pendidikan. Saraswati (2012) meneliti tentang tingkat kesejahteraan masyarakat miskin dalam hubungannya dengan perluasan pegeluaran publik pendidikan untuk mendukung pro miskin. Berdasarkan penelitian pada anggaran belanja pendidikan dari tahun 2003-2008 dapat dinyatakan bahwa belanja minimal untuk pendidikan meningkatkan sebesar

3,8% dari APBD 6,7% dari pendapatan perkapita kabupaten wilayah berkembang. sementara itu, untuk wilayah yang maju menuntut sejumlah 8% dari APBD atau 10,9% dari pendapatan per kabupaten kapita . Dengan pendidikan sistem di indonesia yang sangat kompleks, pemerintah Indonesia berupaya memperbaiki anggaran belanja pendidikan. Semua itu dilakukan untuk dilakukan untuk menghasilkan lebih banyak masyarakat terdidik, yang bisa berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan yang lebih baik dan pertumbuhan ekonomi yang baik . Selain itu, dampak dari belanja pendidikan meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi, yang dapat meningkatkan kualiatns tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat miskin dengan menstransfer kesejahteraan pro rakyat miskin.

Dalam *Indonesia Economic Quarterly Reports* juni 2016 yang diterbitkan oleh *World Bank*, dibahas tentang berapa kebijakan fiskal yang efektif dalam mengurangi kesenjangan dalam masyarakat. Salah satu kebijakan yang dinilai efektif adalah pengeluaran pemerintah berupa transfer langsung yang yang di berikan kepada masyarakat. Salah satu program yang dimuat didalamnya adalah Program Keluarga Harapan yaitu program bantuan tunai bersyarat di Indonesia. setiap rupiah yang di habisakan untuk PKH mengurangi kesenjangan sebesar 2,5 kali lebih besar dari setiap rupiah yang di habisakan untuk raskin, program redistribusi beras pemerintah untuk orng miskin, anggaran raskin 10 kali lebih tinggi dari pengeluaran PKH . Sebagia besar anggaran belanja untuk pendidikan di alokasikan ke sekolah SD dan SMP, untuk mengurangi ketimpangan yang besar. karna di Indonesia kecendrungan bahwa rumah tangga miskin banyak memiliki anak ketimbang dari orang kaya.

2.1.3 Teori Kemiskinan

Menurut Verner (2006) kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok atau masyarakat. Kemiskinan berasal dari kata “miskin” dengan mendapatkan awalan “ke” dan akhiran “ an”. Miskin diartikan tidak berharta benda, serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah), sedangkan kemiskinan adalah situasi penduduk atau sebagian orang yang hidupnya berada di bawah garis kemiskinan, yakni orang yang tertutup kesempatan untuk nafkah serta kebutuhan lainnya seperti pakaian, lapangan pekerjaan.

Kemiskinan adalah ketidak mampuan individu dalam kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah nilai garis standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan, yang disebut garis kemiskinan (*properti line*).

Menurut Oscar Lewis kemiskinan muncul sebagai akibat adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang di anut oleh orang-orang miskin, seperti malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja dan sebagainya. Faktor eksternal datang dari luar kemampuan orang yang bersangkutan seperti birokrasi atau peraturan-peraturan resmi yang dapat menghambat seseorang dalam manfaat sumber daya.

Friedman (dalam Usman, 2006: 43) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial. Basis kekuatan sosial tidak terbatas hanya pada (1) modal produktif atau aset (misalnya organisasi sosial politik yang dapat di gunakan untuk mencapai kepentingan bersama, partai politik, sindikasi, koperasi dan lain-lain), tetapi juga pada (2) *net work* atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang dan lain-lain, (3) pengetahuan dan keterampilan yang memadai dan (4) informasi yang berguna untuk memajukan kehidupan mereka.

Kemiskinan dapat di artikan sebagai situasi yang serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki si miskin, melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Dengan demikian mengentaskan penduduk miskin itu perlu bantuan pihak luar dan miskin itu sendiri. Orang miskin bukanlah orang yang tidak memiliki apapun, melainkan orang yang memiliki sesuatu namun sedikit. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bapennas (2003) menjelaskan kemiskinan adalah situasi serta kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin melainkan karena tidak dapat di hindari dengan kekuatan yang ada padanya.

Kemiskinan menurut Badan koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN (2003) adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan yang dimiliki dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental, maupun fisiknya untuk memenuhi kebutuhannya.

Untuk mengatasi kemiskinan di suatu negara, diperlukan pemahaman pengertian kemiskinan oleh sebab itu, BPS membuat standar kemiskinan antara lain:

1. Tidak miskin, adalah mereka yang memiliki pengeluaran per orang perbulanya \square Rp 350.610
2. Hampir tidak miskin, pengeluaran perbulan per orang Rp 280.488- Rp 350.610.
3. Hampir miskin, pengeluaran perbulan per orang Rp 233,740- Rp 280.488
4. Miskin, pengeluaran per orang per bulan \square Rp 233.740
5. Sangat miskin, pengeluaran per orang per bulan tidak di ketahui secara pasti.

Kriteria kemiskinan tersebut kemudian menunjukkan bahwa jumlah keluarga miskin di Indonesia masih cukup besar dengan sebaran angka kemiskinan penduduk desa lebih besar di banding penduduk kota. Jumlah anak yang banyak dalam satu keluarga dan tingkat pendidikan serta kesehatan yang rendah menjadi beberapa faktor penyebab krusial kemiskinan di pedesaan. Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa pendekatan yang sistematis (adrianus Meliala, Masalah kemiskinan dan kejahatan serta respon kebijakan publik dalam rangka mengatasinya) (Edisi 8, Jurnal Dialog Kebijakan Publik, Desember 2012).

Dari banyaknya defenisi kemiskinan, kemudian dikaji kembali dan diperluas berdasarkan permasalahan-permasalahan dan faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab kemiskinan yang di kemukakan oleh Chambers dan difinisi

tersebut yang saat ini mendapat perhatian dalam setiap program pengentasan kemiskinan di berbagai negara-negara berkembang. Chambers menyatakan bahwa definisi kemiskinan adalah suatu kesatuan konsep (*integrated concept*) yang memiliki lima dimensi yaitu:

a. Kemiskinan (*proper*)

Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok tidak hanya pada kelompok yang tidak memiliki pendapatan, akan tetapi dapat berlaku pada kelompok yang telah memiliki pendapatan namun tidak mampu mencukupi kebutuhannya.

b. Ketidakberdayaan (*powerless*)

Rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial (*social power*) dari seseorang atau kelompok orang terutama dalam memperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

c. Kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*)

Seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga, dimana situasi ini membutuhkan alokasi pendapatan yang cukup untuk menyelesaikannya.

d. Ketergantungan (*dependence*)

Lemahnya kekuatan sosial dari seseorang atau kelompok yang disebut miskin menyebabkan tingkat ketergantungan terhadap pihak lain adalah sangat tinggi.

e. Ketergantungan (*solation*)

Dimensi keterasingan yang dimaksud oleh Chambres adalah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Umumnya kondisi ini berada pada daerah yang jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa masyarakat miskin merupakan masyarakat yang selalu berada pada kondisi ketidakberdayaan atau ketidakmampuan mereka dalam hal memenuhi kebutuhan dasar, yaitu ketidakmampuan dalam : (1) melakukan kegiatan usaha produktif, (2) menjangkau akses sumber daya sosial-ekonomi, (3) membebaskan diri dari mental dan budaya miskin serta senantiasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah

A. Bentuk dan Jenis Kemiskinan

Masalah kemiskinan dan faktor penyebab kemiskinan memperluas pandangan ilmu pengetahuan bahwa kemiskinan tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan dasar seorang atau kelompok akan tetapi kemiskinan merupakan masalah yang multidimensional. Berdasarkan permasalahan tersebut kemiskinan memiliki 4 bentuk yakni sebagai berikut:

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana pendapatan seorang atau kelompok berada di bawah garis kemiskinan, sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, papan serta kesehatan dan pendidikan yang di perlukan untuk meningkatkan kualitas hidup.

2. Kemiskinan relatif

Kemiskinan relatif di artikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya penngaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar sejahtera.

3. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang mengacu pada sikap, gaya hidup, nilai, orientasi, sosial budaya seseorang atau masyarakat yang tidak sejalan dengan kemajuan masyarakat modern.

4. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan.

Dari 4 bentuk kemiskinan di atas dapat di pahami bahwa kemiskinan merupakan ketidak berdayaan dan ketidak mampuan untuk menumbuhkan prilaku dan metalitas miskin yang bermuara pada hilangnya kemerdekaan dalam berusaha dan merasakan kenikmatan kesejahteraan secara bermartabat.

Setelah mengenal bentuk-bentuk kemiskinan brikut ini adalah jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya:

1. Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang berbentuk sebagai akibat adanya kelangkaan sumber daya alam dan minimnya sarana umum. Umumnya kondisi ini di alami oleh daerah yang belum terjangkau oleh pembangunan sehingga menjadi daerah sangat tertinggal.

2. Kemiskinan Buatan

Kemiskinan buatan adalah kemiskinan yang di akibatkan oleh sistem modernisasi atau kemiskinan yang membuat masyarakat sulit untuk menguasai sumber daya alam, sarana umum, dan fasilitas ekonomi secara merata.

B. Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut sharap terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan jika di pandang dari sisi ekonomi.

1. kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya alam yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya yang terbatas dan kuliats yang rendah
2. Kemiskinan muncul akibat adanya perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas SDM yang rendah berarti produktifitasnya rendah, yang pada giliranya upahnya rendah juga. Rendahnya kualitas sumber daya manusia karena rendahnya pendidikan, nasib kurang beruntungann dan adanya keturunan.

2.1.4 Jaring pengaman sosial

Jaring Pengaman Sosial (JPS) adalah bantuan sosial yang tidak terencana berupa uang yang diberikan kepada penduduk dengan status sosial ekonomi sebagai keluarga miskin dan/atau rentan miskin serta keterlantaran. Keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia selama tiga puluh tahun Orde baru semestinya mampu menangkal berbagai masalah sosial ekonomi masyarakat. Namun demikian, kelemahan struktural berupa ketimpangan dalam ketersediaan prasarana, kelembagaan, serta pengelolaan (*governance*) dan koordinasi pengelolaan sumberdayanasional menyebabkan proses pemulihan (*recove*) dan

penanggulandangampak krisis, berlangsung sangat lambat Jaringan pengaman sosial merupakan satuintrumen yang terkoordinasi dan terpadu antara program pembangunan khususmenanggulangi keadaan krisis (*crash program*) dan program pembangunan regulermenanggulangi masalah kronis tantangan fundamental ekonomi berupa kesenjangan, kemiskinan dan ketertinggalan.

Negara-negara yang terkena imbas krisis ekonomi atau bencana alam harusmenghadapi realitas yang cukup pahit, yakni ketidakmampuan untuk mengisolasi kawasannya dari dampak negatif krisis ekonomi dan bencana alam tersebut atas masalah sosial. Namun demikian, bagi negara yang menganut paham negara kesejahteraan (*welfare state*) yaitu negara yang sudah memiliki program jaring pengaman sosial, tidak sulit untuk menang gulangi dampak krisis ekonomi danbencana alam tersebut. Upaya ini bisa dilakukan melalui upaya mengkoordinasikan,mengalokasikan, dan menyalurkan dana jaring pengaman sosial langsung kepadakelompok sasaran masyarakat yang terkena dampak. Jika tidak, akan timbul dampakyang lebih buruk pada individu atau keluarga sebagai kelompok sasaran (*vulnerablegroup*) (Anggito Abimanyu dkk, 1998).

Di sisi lain, masalah pendanaan jaring pengaman sosial seringkali menimbulkan permasalahan tersendiri. Dalam situasi krisis dan keterbatasan sumberdana pemerintah seperti yang saat ini terjadi di Indonesia, pelaksanaan program jaring pengaman sosial akan menemui banyak keterbatasan. Kalaupun dananya bisa disediakan dalam jumlah yang cukup (misalnya melalui pinjaman/bantuan luarnegeri), persoalan lain yang timbul adalah bagaimana mengelola dana tersebut agar bisa cepat dan tepat mengenai sasaran, sehingga

penanggulangan dan pemulihan bisa secara efektif, efisien dan segera. Oleh karenanya, perlu dibentuk suatu mekanisme yang terstruktur mulai dari tahap perencanaan pengelolaan, hingga merumuskan agenda aksi yang dapat memenuhi kebutuhan individu atau kelompok sasaran.

Paket bantuan sosial bagi masyarakat rentan krisis dalam kerangka jaring pengaman sosial ditempuh pertama kali oleh Presiden Roosevelt pada tahun 1930-an di Amerika Serikat. Depresi ekonomi yang melanda Amerika Serikat disertai badai salju yang parah mengakibatkan lumpuhnya sebagian besar kegiatan ekonomi riil negara itu. Angka pengangguran meningkat tinggi, serta terjadi kontraksi ekonomi yang disertai dengan melambungnya harga kebutuhan pokok. Menurunnya produktivitas berbagai sektor perekonomian ini mengakibatkan daya beli masyarakat menurun yang mengakibatkan ketidakmampuan masyarakat memenuhi kebutuhan pokok. Akibatnya kualitas hidup sebagian besar masyarakat menurun drastis. Kondisi ini kemudian segera diatasi melalui langkah jangka pendek (crash program) dengan tujuan memulihkan kegiatan ekonomi dan menangkal dampak sosial.

Di Indonesia dikenal dua pengertian JPS, "klasik" sesuai pengertian aslinya yaitu memberikan bantuan pangan dan penciptaan lapangan kerja yang bersifat padat karya. JPS "disempurnakan atau JPS Plus" yaitu pemberian bantuan berlanjutan pada kegiatan sosial ekonomi produktif. JPS Plus telah diadopsi Indonesia dalam program/gerakan penanggulangan kemiskinan dalam gerakan nasional program IDT 1993.

Di Indonesia, saat ini program-program JPS diprioritaskan pada: (i) peningkatan ketahanan pangan (*food security*) yang diarahkan untuk menjamin ketersediaan bahan makanan yang cukup dan terjangkau oleh masyarakat; (ii) penciptaan lapangan kerja produktif (*labour intensif*) yang diarahkan untuk memberikan kesempatan dalam kegiatan ekonomi melalui pola padat karya produktif; (iii) perlindungan sosial (*social protection*) diarahkan untuk mempertahankan akses masyarakat pada pelayanan dasar terutama pendidikan dan kesehatan; dan (iv) pengembangan usaha kecil dan menengah (*small medium enterprise*) untuk pemberdayaan ekonomi rakyat produktif yang berjiwa kooperatif melalui bantuan modal, pelatihan, penyuluhan, bimbingan serta bantuan promosi dan kemitraan usaha. Keempat prioritas itu perlu menjadi landasan bagi upaya penanggulangan masalah kesenjangan. Kesenjangan antar sektor kegiatan ekonomi dilakukan melalui progra-program pembangunan sektoral, kesenjangan antardaerah dilakukan melalui program-program pembangunan daerah, dan kesenjangan antar manusia/golongan dilakukan melalui program-program pembangunan khusus.

Pendekatan dalam program JPS adalah pertumbuhan melalui pemerataan secara berkelanjutan yang dilaksanakan melalui kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam wadah pengembangan komunitas disertai pendampingan sebagai fasilitator. Penyediaan tenaga pendamping melibatkan peranserta lembaga pengembang swadaya masyarakat (LPSM/LSM) untuk membina dan memantau pengelolaan bantuan. Pengelolaan bantuan menerapkan prinsip pembangunan

partisipatif yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat dalam wadah kelompok usahaproduktif bersama, seperti pokmas (kelompok masyarakat), poksar (kelompok sasaran), dan lain-lain

Prinsip Pengelolaan dan Pelestarian Program
Prinsip pengelolaan program JPS mengikuti aras:

1. penyaluran bantuan yang cepat dan langsung kepada kelompok masyarakat penerima manfaat
2. rencana kegiatan harus dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka
3. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administratif
4. hasil kegiatan harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat
5. hasil kegiatan harus dapat dilanjutkan dan dikembangkan oleh masyarakat sendiri dalam wadah organisasi masyarakat setempat
6. program dapat dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh wilayah yang memerlukan perhatian. Pelestarian hasil kegiatan dikembangkan oleh masyarakat sendiri dalam wadah organisasi masyarakat setempat. Hasil kegiatan menjadi modal usaha kelompok.

Masyarakat untuk usaha lebih lanjut dan pengelolaannya diselenggarakan oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK) milik masyarakat sesuai prinsip pengelolaan program, yaitu penyaluran bantuan cepat dan langsung sampai kepada kelompok masyarakat penerima manfaat (*quick disbursement*), rencana kegiatan harus dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka (*transparency*), seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan

baik secara teknis maupun administratif (*accountability*), dan hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat sendiri dalam wadah organisasi masyarakat setempat (*sustainability*).

Program JPS berupa dana yang disalurkan langsung kepada masyarakat padatingkat desa/kelurahan harus dapat dikelola dalam wadah unit pengelola keuangan(UPK) yang pengelolaannya dilakukan sendiri oleh masyarakat. UPK berperansebagai pengelola berbagai dana yang berasal dari pemerintah melalui mekanismeDIP (Daftar Isian Proyek) dan SPABP (Surat Pengesahan Anggaran BantuanPembangunan) tersebut serta dana bergulir dari masyarakat. UPK dapat berkembangmenjadi lembaga pengelola keuangan milik masyarakat yang berbadan hukum koperasi (mengikuti UU koperasi) atau berbadanhukum lain (mengikuti UU bank).Lembaga pembiayaan milik masyarakat ini selanjutnya dikenal dengan lembagakeuangan alternatif milik masyarakat.

Program JPSperlu dipahami sebagaistimulanuntuk mendorong produktivitasdan meletakkan landasan pembangunan yang kuat dan berkesinambungan. Polapembangunan demikian diharapkan mampu mewujudkan arah pembangunanberdimensi kerakyatan yang bermuatan:

- a. memberikan kesempatan bagi peransertaaktif masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi yang lebih demokratis.
- b. pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan pemantapan otonomi daerah yangdiselenggarakan secara nyata dan dinamis
- c. pemantapan perubahan struktur darimasyarakat sendiri dengan penajaman pada modernisasi

- d. keterpaduan dan keterkaitan berbagai program yang makin erat antar manusia, antardaerah, antarsektor kegiatan ekonomi, serta antara kegiatan makro dan mikro nasional.

2.2 Pengertian Program Keluarga Harapan Dan Tujuan Program Keluarga Harapan

2.2.1 Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan adalah program penanggulangan kemiskinan yang memberikan bantuan uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin /keluarga sangat miskin (RSTM/KSM) yang ditetapkan oleh PKH.

2.2.2 Tujuan Program Keluarga Harapan

Tujuan umum Program Keluarga Harapan adalah meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pada rumah tangga sangat miskin untuk tercapainya suatu kehidupan keluarga miskin PKH diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam jangka pendek serta memutuskan rantai kemiskinan dalam jangka panjang. (Kemensos 2016)

2.2.3 Penerima Program Keluarga Harapan

Penerima PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin atau Keluarga Sangat Miskin yang memenuhi satu atau beberapa kriteria yaitu: 1, Ibu hamil/ibu nifas/anak balita. 2, anak berusia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (pra sekolah), 3. Anak usia 7-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun, 4. Penyandang disabilitas berat dan lanjut usia 70 keatas.

2.2.4 Pengertian Dampak

Dampak adalah pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun bersifat negatif, pengaruh juga disebut suatu keadaan di mana ada hubungan timbal balik atau pun hubungan akibat antara apa yang berpengaruh dengan apa yang di pengaruhi. Dampak lain dari Pogram Keluarga Harapan adalah dampak menurunkan tingkat kemiskinan bagi masyarakat penerima Perogram Keluarga Harapan.

2.3 Penelitian Terdahulu

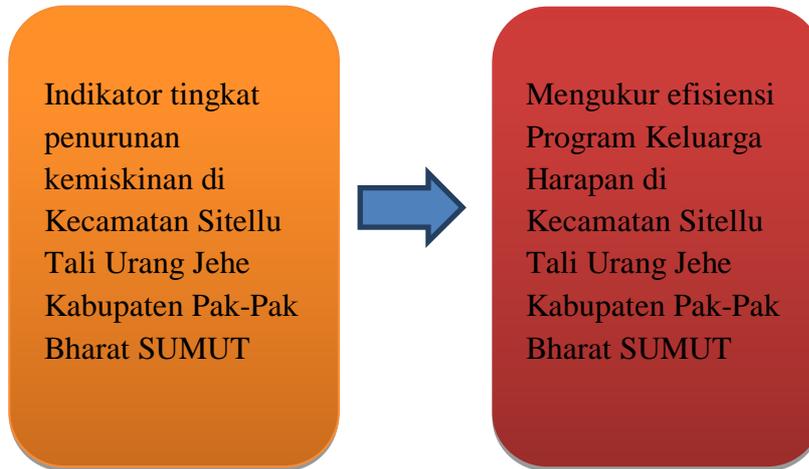
Tabel 2.1

Judul, Nama Penulis, Tahun	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Kesimpulan
<p>Pengaruh Kebijakan Perogram Keluarga Harapan(PKH) Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa</p> <p>Munawwar Sahib (2016)</p>	<p>PKH Penganggulangan Kemiskinan</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Pengaruh Kebijakan PKH</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH yang dilaksanakan di kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa berjalan dengan sangat baik. Hal tersebut dapat di lihat dari seluruh kegiatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dapat di jalankan dengan baik. 2. menunjukkan bahwa PKH berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggulangan kemiskinan di kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.
<p>Dampak Kebijakan Pemerintah Akan Perogram Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di kelurahan Terjun Medan Marelan (Sonia Hariyati)(2018)</p>	<p>PKH Kesejahteraan Masyarakat</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Dampak kebijakan perkembangan Kesejahteraan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RSTM Keluarga Penerima Manfaat di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan, penelitian dilakukan terhadap 42 responden Keluarga Penerima Manfaat perkembanganya sudah baik. 2. Persyaratan sebagai penerima PKH di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan, dari 42

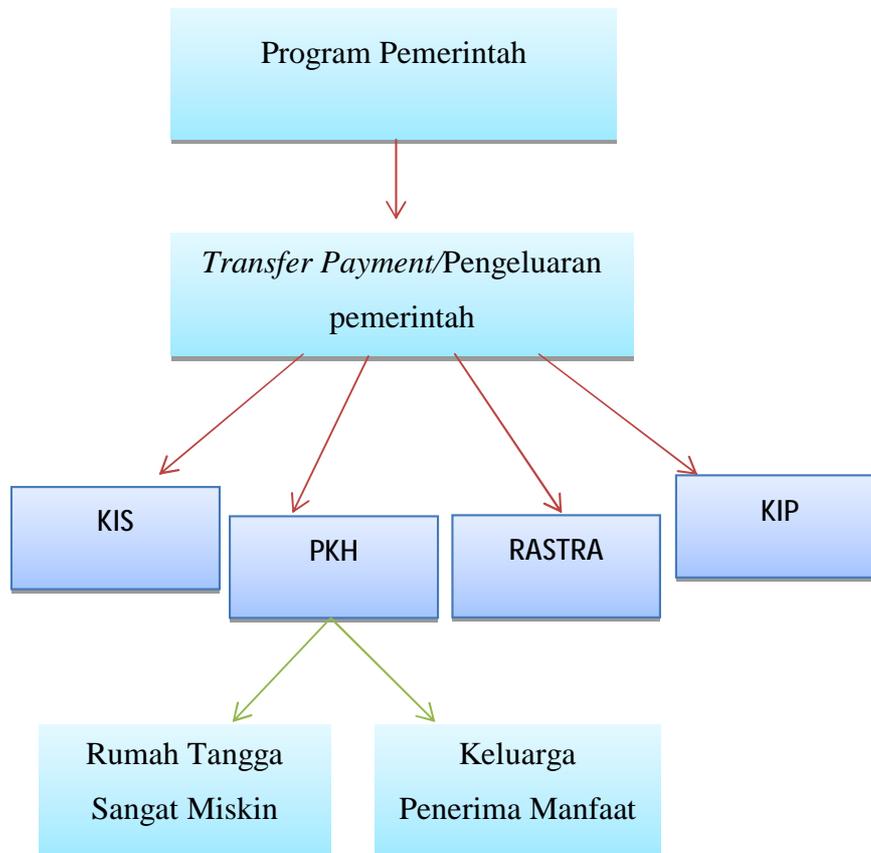
			<p>responden Keluarga Penerima Manfaat Masih ada beberapa penerima yang tidak memenuhi persyaratan seperti dari segi fisik rumah, memiliki asset tetap (kebun, kendaraan bermotor) Hal ini yang menyebabkan tidak efektifnya penetapan KPM di Kelurahan Terjun.</p> <p>3. Tujuan khusus PKH untuk meningkatkan ekonomi, pendidikan serta status kesehatan Keluarga Penerima Manfaat di kelurahan terjun kecamatan medan marelan perogram keluarga harapan baru mampu meningkatkan partisipasi pendidikan dan kesehatan pesertanya. Sedangkan dari segi ekonomi belum mampu menekan/menegentaskan tingkat kemiskinan di kelurahan terjun ini, partisipasi pendidikan dan kesehatan inilah yang di harapkan dapat memutus rantai kemiskinan.</p>
--	--	--	---

2.4 Kerangka Konseptual

2.4.1 Gambar Prosedur Penelitian



2.4.2 Kerangka Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian deskriptif. menurut Mudrajad Kuncoro (2013:198) menyimpulkan analisis deskriptif salah satu bentuk analisis adalah kegiatan menyimpulkan data mentah dan jumlah yang besar sehingga hasilnya dapat ditafsirkan. Mengelompokkan atau memisahkan komponen atau bagian yang relevan dari keseluruhan data, juga merupakan salah satu bentuk analisis untuk menjadikan data mudah dikelola.

3.2 Definisi Operasional

Defenisi operasional merupakan acuan dari tinjauan pustaka yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana antara variabel yang satu dengan variabel yang lainya dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan data yang di inginkan. Adapun variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah tingkat penurunan kemiskinan dalam Rumah Tangga Sangat Miskin dan Rumah Tangga Miskin.

3.2.1 Indikator Variabel Penelitian

NO	Indikator	Defenisi Variabel Penelitian	Sumber Data
1.	Rumah Tangga Miskin Dan Keluarga Sangat Miskin	Rumah Tangga Miskin dan Keluarga Sangat Miskin yang di data oleh BPS dan di kelola oleh TNP2K menjadi Rumah Tangga Sangat Miskin dan Keluarga Penerima Manfaat dari RSTM dan KPM maka dibuat menjadi Perogram Keluarga Harapan dalam penurunan tingkat kemiskinan	BPS,KEMENSOS

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat

Lokasi penelitian ini di lakukan di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pak-Pak Bharat Sumatera Utara adapun alasan pemilihan lokasi penelitian karena Kecamatan Sitellu tali urang jehe memiliki banyak penduduk miskin yang mendapatkan dana Program Keluarga Harapan.

3.3.2 Waktu Penelitian

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No		November				Desember				Januari				Februari				Maret				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Pengumpulan data, pengajuan judul dan pengesahan																					
2.	Penulisan Proposal																					
3.	Seminar Proposal																					
4.	Analisa Data																					
5.	Penulisan Laporan																					
6.	Sidang Meja Hijau																					

3.4 Jenis dan Sumber Data

- A. Data primer menurut Kuncoro yaitu data yang di kumpulkan dari sumber-sumber asli untuk tujuan tertentu. Dalam hal ini sumber-sumber asli yang di maksud dari beberapa rumah tangga atau keluarga yang menerima PKH melalui wawancara secara langsung di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pak-Pak Barat. Data ini disebut juga data kualitatif.
- B. Data sekunder menurut Kuncoro yaitu data yang dikumpulkan oleh pihak lain data ini disebut juga dengan data kuantitatif dalam hal ini saya mengambil data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Kementrian Sosial, serta data-data yang diperoleh dari Kantor Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe.

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Populasi adalah menunjukkan keadaan dan jumlah objek penelitian itu sendiri. Menurut Kuncoro (2001:bab 3) populasi adalah kelompok atau elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian di mana kita tertarik untuk mempelajari atau menjadi objek penelitian. Pada penelitian ini populasi yang dimaksud adalah masyarakat miskin yang ada di 3 desa yaitu Sbande, KM20, Kaban Tengah.

3.5.2 Sampel

Sampel adalah suatu himpunan bagian (*subset*) dari unit populasi (Kuncoro 2013:118). Menurut Sugiyono (2010:63), *Probability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sample.

Besarnya sampel dalam penelitian ini berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus slovin yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N(1 + Ne^2)}$$

Keterangan :

n = Jumlah elemen /anggota sample

N = Jumlah elemen/anggota populasi

e = Error level (tingkat kesalahan 10%)

Populasi yang terdapat dalam penelitian ini berjumlah 200.000 orang dan presesi yang yang ditetapkan atau tingkat singnifikan 0,1 maka besarnya sample pada penelitian ini adalah:

$$n = \frac{N}{N(1 + NXe^2)}$$

$$n = \frac{492}{1(492 \times 0,1^2)}$$

$n = 83$ dibulatkan menjadi 100

Jadi jumlah keseluruhan responden dalam penelitian ini adalah 100 sampel.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan oleh penelitian dalam penelitian ini adalah sebagian berikut:

1. Wawancara, sebagian teknik komunikasi langsung untuk memperoleh data yang di butuhkan.
2. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data melalui penyebaran pertanyaan kepada responden yang sudah menjadi anggota sample penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang di gunakan adalah analisis deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak di gunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Data yang di peroleh melalui data kualitatif yaitu dapat diukur dengan skala numerik namun, data ini dikuantitafkan agar dapat di peroses lebih lanjut. Jenis data kualitatif ini adalah adalah data nominal, dimana data tersebut dinyatakan dalam bentuk kategori, dan akan di deskripsikan dalam bentuk peresentasi dan grafik.

BAB IV

4.1 Gambar Umum Kabupaten Pak-Pak Bharat

4.1.1 Kondisi Geografi

ini dibentuk pada tanggal 25 Februari 2003, beribukotakan Kota Salak. Kabupaten ini berdiri sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Dairi. Kini Kabupaten Pakpak Bharat memiliki 8 kecamatan, yaitu Kecamatan Salak, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kecamatan Pangindar, Kecamatan Sitellu Tari Urang Julu, Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut, Kecamatan Kerajaan, Kecamatan Tinada, dan Kecamatan Siempat Rube dan memiliki sebanyak 52 desa.

Pakpak Bharat bukan menunjukkan daerah Pakpak yang terletak di bagian barat, melainkan memiliki dua arti nama yang digabungkan menjadi satu yaitu Pakpak adalah nama daerah sedangkan *Bharat* artinya adalah baik, jadi Pakpak Bharat adalah daerah Pakpak yang baik. Kabupaten Pakpak Bharat terletak pada garis 2,00–3,00 Lintang Utara dan 96,00–98,30 Bujur Timur, dan berada di ketinggian 2501.400 M di atas permukaan laut.

Kabupaten Pakpak Bharat memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut.

Sebelah Utara: Kecamatan Silima Pungga-pungga, Kecamatan Lae

Parira dan Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi;

Sebelah Selatan: Kecamatan Tara Bintang Kabupaten Humbang

Hasundutan, Kecamatan Manduamas Kabupaten

Tapanuli Tengah;

Sebelah Timur: Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi, Kecamatan
Harian Kabupaten Tobasa; dan
Sebelah Barat: Kecamatan Aceh Singkil Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam.

Luas keseluruhan Kabupaten Pakpak Bharat adalah 1.218,30 km (121.830 Ha) atau 1,7 dari luas Provinsi Sumatera Utara. Dari luas wilayah tersebut 63.974 Ha (52,51) diantaranya merupakan lahan yang efektif dan 53.156 Ha (43,63) merupakan lahan yang belum dioptimalkan. Pada umumnya masyarakat Pakpak Bharat tinggal di pedesaan dengan mata pencaharian utamanya adalah bertani.

Secara geografis, Kabupaten Pakpak Bharat terletak pada garis 2° 15'00"- 3° 32'00" Lintang Utara dan 96° 00'00"- 98°31' 00" Bujur Timur. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Dairi, sebelah Timur dengan Kabupaten Toba Samosir, sebelah Selatan dengan Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten HumbangHasundutan, dan sebelah Barat dengan Kabupaten Aceh Singkil.

Wilayah administrasi Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2018 terdiri dari 8 kecamatan dengan 52 desa. Kecamatan Salak dan Sitellu Tali Urang Jehe merupakan kecamatan dengan jumlah desa terbanyak, yaitu 10 desa. Sedangkan Kecamatan Pagindar merupakan kecamatan dengan jumlah desa yang paling sedikit, yaitu hanya 4 desa. Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yaitu 473,62 km² atau 38,87% dari total luas Kabupaten Pakpak Bharat, sementara Sitellu Tali Urang Julu merupakan wilayah terkecil yaitu 53,02 km² atau 4,35% dari total luas Kabupaten Pakpak Bharat.

Kecamatan Pagindar merupakan kecamatan yang paling jauh dari ibukota Pakpak Bharat yaitu berjarak sekitar 120 kilometer ke Ibukota Kecamatan.

Kabupaten Pakpak Bharat memiliki luas wilayah 1.218,30 km atau 1,67% dari total luas Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis, Kabupaten Pakpak Bharat terletak pada garis 2°15'- 3°32' Lintang Utara dan 96°00' - 98°31' Bujur Timur. Karena terletak dekat Garis Khatulistiwa, Kabupaten Pakpak Bharat tergolong ke daerah beriklim tropis. Ketinggian antara 700 – 1.500 meter diatas permukaan laut dengan kondisi geografis berbukit – bukit.

Tabel 4.1

Luas Wilayah di Kabupaten Pakpak Bharat

NO	Kecamatan	Luas	Persentase
1	Salak	245,57	20,16
2	Sitellu Tali Urang Jehe	473,62	38,87
3	Pagindar	75,45	6,19
4	Sitellu Tali Urang Julu	53,02	4,35
5	Pergeteng-getteng Sengkut	66,64	5,47
6	Kerajaan	147,61	12,12
7	Tinada	74,03	6,08
8	Siempat Rube	82,36	6,76
	JUMLAH	1 218,38	100,00

Sumber : Pakpak Bharat Dalam Angka 2017

4.1.2 Kondisi Demografi

Pembangunan kependudukan di Kabupaten Pakpak Bharat dengan mengindahkan kelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup sehingga mobilitas dan persebaran penduduk tercapai optimal, berdasarkan pada keseimbangan antar jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Persebaran penduduk yang tidak di dukung oleh dan pembangunan akan menimbulkan masalah sosial kompleks, dimana penduduk menjadi beban bagi lingkungan maupun sebaliknya. Pada tahun 2016 penduduk Kabupaten Pakpak Bharat mencapai 46,392 jiwa. Dibandingkan jumlah penduduk pada tahun 2017 terjadi pertambahan penduduk sebesar 47,183 jiwa. Dengan luas wilayah mencapai 1.218, 3 km², kepadatan penduduk mencapai 38,77 jiwa/km².

Tabel 4.2

Banyaknya Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pak Pak Bharat Tahun 2016

No	Kecamatan	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Salak	4 084	4 194	8 278	97, 38
2	Sitellu Tali Urang Jehe	5 377	5 340	10 717	100, 69
3	Pagindar	759	630	1 389	120, 48
4	Sitellu Tali Urang Julu	1 976	1 894	3 870	104, 33
5	Pergeteng-getteng Sengkut	2 166	2 115	4 281	102, 41
6	Kerajaan	4 667	4 643	9 310	100, 52

7	Tinada	2 135	2 027	4 162	105, 33
8	Siempat Rube	2 229	2 156	4 385	103, 39
	Jumlah/Total	23 393	22 999	46 392	101, 71

Sumber : Pakpak Bharat Dalam Angka 2017

Kesimpulan pada tabel di atas adalah bahwasanya di Kabupaten Pak pak Bharat mendominasi penyebaran penduduk menurut jenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada penduduk berjenis kelamin perempuan.

Adapun tenaga kerja Kabupaten Pak pak Bharat berdasarkan data yang di dapat dari Dinas Sosial, sebanyak 40 pencari kerja pada tahun 2016 menyampaikan permohonan izin untuk menjadi tenaga kerja asing. Lapangan kerja kemasyarakatan, sosial dan perorangan merupakan jenis lapangan usaha yang paling diminati. Jumlah pencari kerja terdaftar berjumlah 45 orang yang di dominasi oleh usia 10-29 Tahun yang tamatan SMA dan setara dengan Perguruan tinggi.

4.1.3 Gambaran Umum Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe

Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe adalah salah satu kecamatan dengan luas sebesar wilayah yaitu 473,62 km² atau 38.87% dari total luas Kabupaten Pakpak Bharat Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe yang lama yang di kelilingi oleh pegunungan. Dengan seiringnya berjalan waktu Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe berkembang begitu pesat sehingga mengakibatkan pembangunan rumah dimana-mana.

Secara geografis, wilayah Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe berbatasan langsung dengan:

Sebelah Utara : Kecamatan Silima Punga-punga, Kecamatan Lae parira,
Kecamatan Sidikalang

Sebelah Timur : Kecamatan Kerajaan

Sebelah Selatan : Kecamatan Salak dan Kerajaan

Sebelah Barat : Kota Subulusalam

Pada tahun 2016 penduduk Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe berjumlah 10.526 jiwa dimana penduduk dengan jumlah terbanyak yaitu di desa kaban tegah yaitu sebanyak 1 942 jiwa dan yang terkecil di desa perjaga dengan jumlah penduduk 470 jiwa.

Mayoritas penduduk Kecamatan Setellu Tali Urang Jehe memeluk agama islam 90% dari jumlah penduduk keseluruhan kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe dan jumlah kristen protestan sebanyak 10 % . Penduduk yang bermuki di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe sifatnya Homogen dan Monokultur, yaitu didiami oleh mayoritas etnis batak,pakpak yang terdiri dari beberapa marga dan

dengan kultur batak pakpak pula. Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe hanya sedikit didiami oleh etnis lain, adapun etnis lain yang turut mendiami daerah Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe adalah etnis Batak Toba, Batak Simalungun dan Batak Mandailing sebagian kecil suku Jawa dll dan kebanyakan sudah memakai kultur suku Batak pakpak dalam bermasyarakat.

Letak Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Memiliki Topografi Daerah yang berbukit-bukit curam dan sangat jarang didapati daerah yang datar, daerahnya sebagian besar dikelilingi oleh pegunungan. Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe berada pada ketinggian antara 650 s/d 950 m di atas permukaan laut. Keadaan iklim Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe umumnya beriklim tropis panas. Iklim tropis panas ini juga dipengaruhi oleh kondisi Topografi, dimana daerah yang berbukit-bukit dan kemiringan tanah yang sebagian besar curam dan juga dipengaruhi letak daerah dimana dikelilingi oleh pegunungan sehingga hal ini juga mempengaruhi keadaan iklim di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe. Jarak antara Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat yaitu 14,0 km.

Komoditi tanaman pangan yang unggul di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe yaitu padi dan jagung serta tanaman tua yaitu gambir dan berdasarkan Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe jalannya tepat dengan lintasan Sumatera Utara ke Aceh Selatan maka pembangunan semakin meningkat.

Jumlah penduduk Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe pada tahun 2016 yaitu sebesar 10.526 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki lebih banyak sebesar 5.468 jiwa sedangkan perempuan 5.058 jiwa. Dilihat dari kelompok umur

masyarakat Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe di dominasi dengan anak-anak balita dan dini umur 5-9 Tahun sebesar 1.511 jiwa dan jumlah penduduk yang paling sedikit menurut kelompok usia 70 Tahun sebesar 94. Bila dilihat dari tingkat pendidikannya, penduduk Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe sebesar 3.212 jiwa dimana SD sebesar 1.763 jiwa, SMP sebesar 889 jiwa, SMA 220 jiwa, MAS 30, dan SMU 310 jiwa. Menurut jenis pekerjaannya penduduk Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe kebanyakan bertani dan bersawah.

Sibande atau Tanjung Meriah salah satu Desa yang ada di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe. Desanya terdiri dari empat lorong. Kaban tengah adalah salah satu Desa yang berada di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe. Desanya terdiri dari 7 lorong. Simberuna atau KM 20 adalah salah satu Desa yang ada di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Desanya terdiri dari empat lorong. Dimana pada ketiga Desa tersebut sebagai objek dari penelitian saya yang menerima Program Keluarga Harapan, dalam ketiga Kelurahan ini pekerjaan sehari-hari yaitu bertani atau berladang.

4.2 Analisis Penelitian

4.2.1 Analisis Deskriptif Perkembangan Kemiskinan Di Kabupaten Pakpak

Bharat Sumatera Utara

Penulis menganalisis data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian dengan menyebarkan beberapa angket (kuesioner) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe yang telah ditetapkan sebagai sampel di tiga desa, yaitu sebanyak 100 sampel. Menganalisis data merupakan suatu upaya untuk menata dan mengelompokkan data menjadi satu

bagian-bagian tertentu berdasarkan jawaban sampel penelitian. Analisis data yang dimaksud adalah interpretasi langsung berdasarkan data dan informasi yang di peroleh dilapangan. Adapun data yang di analisis pada bab ini adalah sebagai berikut.

Indikator Kemiskinan di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe dulunya sangat banyak dan dengan adanya transfer payment pemerintah berbentuk PKH maka dari itu masyarakat Sitellu Tali Urang Jehe merasa terbantu dengan adanya PKH tersebut karena di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe banyak masyarakat yang kurang mampu untuk menyekolahkan anak-anaknya dan dominan pekerjaan mereka hanya sebagai petani dengan upah yang sangat pas-pasan. Maka dari itu mereka sangat bersyukur mendapatkan PKH sehingga kemiskinan mereka dapat berkurang. Berdasarkan dalam komponen-komponen PKH seperti kesehatan pada ibu hamil/menyusui mereka mengatakan sangat terbantu dengan adanya PKH sehingga mereka terjaga dari penyakit yang tidak di inginkan seperti gizi buruk terhadap balitanya. Berdasarkan komponen pendidikan mereka juga mengatakan dengan adanya *Transfer Payment* berbentuk PKH anak-anak mereka bisa terbantu dengan pendidikan dari SD sampai SMA.

Tabel 4.3

Data Bantuan Sosial (Bansos) Perogram Keluarga Harapan

Kabupaten Pak-Pak Bharat SUMUT

No	Kecamatan	Desa	Jumlah RT
1	Sitellu Tali Urang Jehe	Bandar Baru	97
		Kaban Tengah	87
		Maholida	13
		Malum	25
		Mbinalun	55
		Perjaga	8
		Perolihen	64
		Simberuna (Km 20)	34
		TanjungMeriah (Sibande)	67
		Tanjung Mulia	42
		TOTAL	492
2	Pagindar	Lae Mbentar	30
		Napatalun	23
		Perlambukan	
		Pagindar	27
		Sibagindar	35
TOTAL	115		
3	Pergetteng-getteng Sengkut	Aornakan I	59
		Aornakan II	46
		Kecupak I	44
		Kecupak II	83
		Simerpara	15
		TOTAL	247
4	Salak	Boangmanalu	102
		Salak	
		Kuta Tinggi	91
		Penaggalan Binaga	25
		Boang	
		Salak I	68
		Salak II	16
		Sibongkaras	6
TOTAL	308		

5	Siempat Rube	Kuta Junggak	39
		Mungkur	39
		Siempat Rube I	40
		Siempat Rube II	57
		Siempat Rube IV	101
		Traju	6
		TOTAL	282
6	Sitellu Tali Urang Julu	Cikaok	21
		Lae Langge	57
		Namuseng	68
		Pardomuan	39
		Silima Kuta	36
		Ulu Merah	36
		TOTAL	221
7	Tinada	Buluh Tellang	28
		Kuta Babo	27
		Mahala	37
		Progil	51
		Silimakuta	58
		Tinada	21
		TOTAL	222
8	Kerajaan	Kuta Meriah	37
		Kutadame	68
		Kutasanga	19
		Majanggut I	45
		Majanggut II	5
		Pordomuan	19
		TOTAL	193

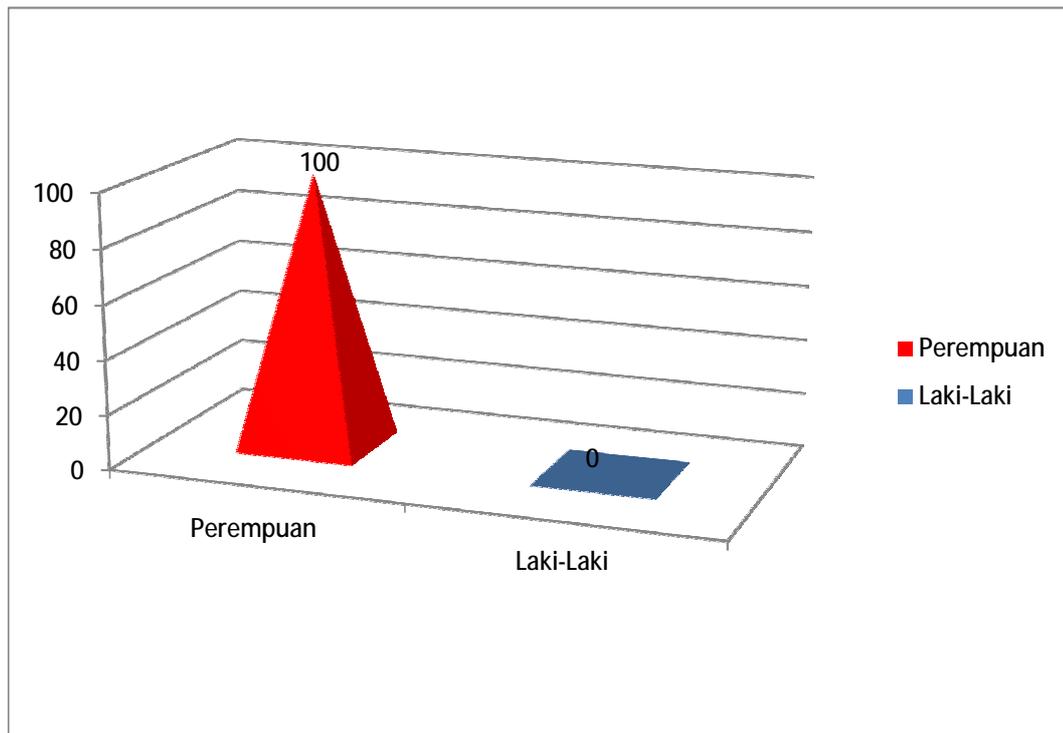
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pak-Pak Bharat 2019

Dari kesimpulan tabel diatas dapat kita lihat bahwa bantuan yang paling banyak di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe sebanyak 492 rumah tangga yang mendapatkan bantuan PKH di Kecamatan ini terdapat 10 desa, dan yang paling sedikit mendapatkan bantuan PKH berada di Kecamatan Pagindar dengan jumlah empat desa berjumlah 115 rumah tangga yang mendapatkan bantuan PKH. Dimana penduduk Kabupaten Pak-Pak Bharat kemiskinanya pada tahun 2017

berjumlah 2.274 jiwa sementara pada tabel dinas sosial pada bantuan PKH berjumlah 20,80 jiwa.

Gambar 4.1

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Berdasarkan Jenis Kelamin

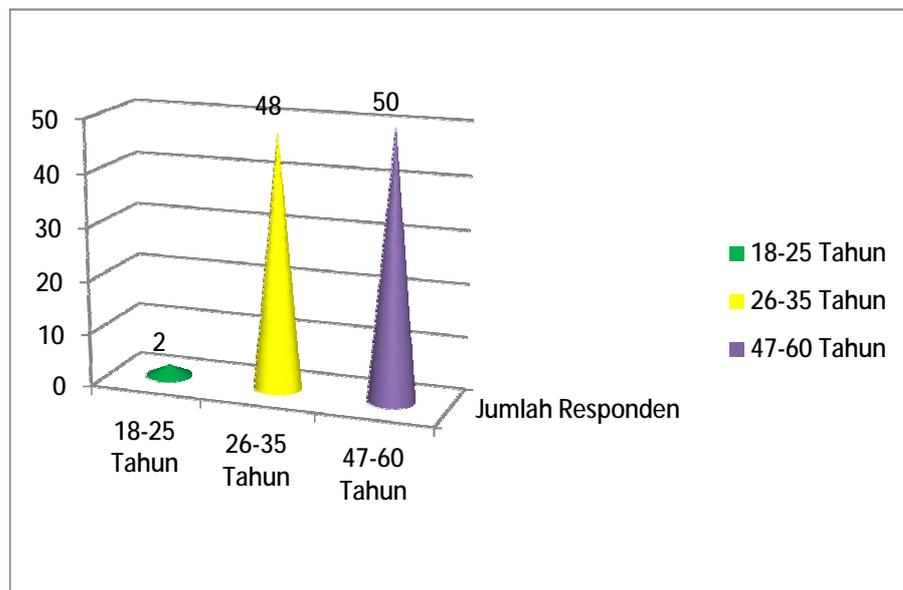


Dari data diatas dapat dilihat bahwa 100 responden 100% Keluarga Penerima Manfaat (KPM) semua yang menerima Perogram Keluarga Harapan (PKH) yang berjenis kelamin adalah perempuan dimana pada Perogram Keluarga Harapan (PKH) ini sebagai kepala rumah tangganya adalah perempuan pada saat menerima atau rapat tentang Perogram Keluarga Harapan dikarenakan perempuan yang pandai berbicara atau hanya perempuan yang berani bertanya tentang sesuatu hal tentang Perogram Keluarga Harapan.. penelitian ini sudah ditetapkan yaitu dengan 100 kepala keluarga rumah tangga perempuan sebagai bahan penelitian, karena yang berhak menerima Perogram Keluarga Harapan (PKH) adalah kepala keluarga perempuan. Tetapi jika perempuawasa (istri) tidak ada lagi dalam keluarga, kepala keluarga laki-laki berhak menerimanya. Dalam

penelitian ini kebetulan yang menjadi sampel Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pak-pak Bharat hanya kepala keluarga perempuan, dikarenakan seluruh sampel masyarakat penerima PKH masih memiliki istri/perempuan tertua dalam rumah tangga dikarenakan perempuan (istri) yang lebih berhak menerima PKH tersebut sebagai kepala keluarga.

Gambar 4.2

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Berdasarkan Umur

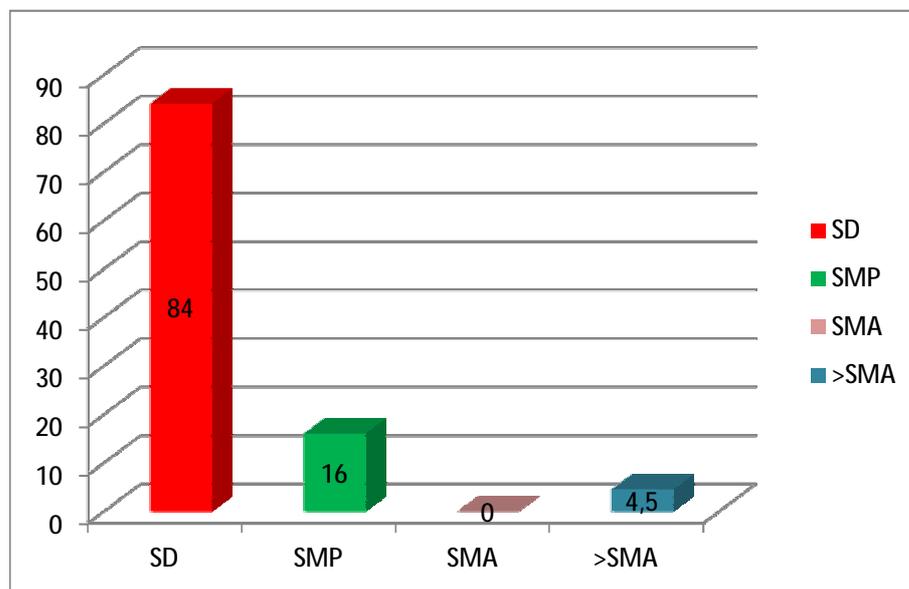


Dari data di atas dapat dilihat bahwa usia Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang 100 responden, mulai usia 18-60 tahun hingga tertua 60 tahun. Jumlah penerima KPM terbanyak adalah usia 47-60 tahun yaitu 50% atau 50 orang. Dengan jumlah penerima KPM paling sedikit adalah berusia 18-25 tahun yaitu 2% atau 2 orang. Kemudian untuk usia 26-35 tahun adalah 48% atau 48 orang. Mengapa usia 47-60 yang banyak menerima PKH, karena memang di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe lebih banyak KPM yang usianya tidak terlalu tua karena rata-rata masih memiliki anggota keluarga yang masih sekolah, sehingga kepala keluarga yang diteliti lebih banyak usia tidak terlalu tua

dibandingkan usia tua. Demikianlah penelitian menemukan sampel usia KPM di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe. Serta merupakan 100 responden yang KPM mempunyai berstatus suami/istri.

Gambar 4.3

Keluarga Penerima Manfaat Berdasarkan Pendidikan (Suami)

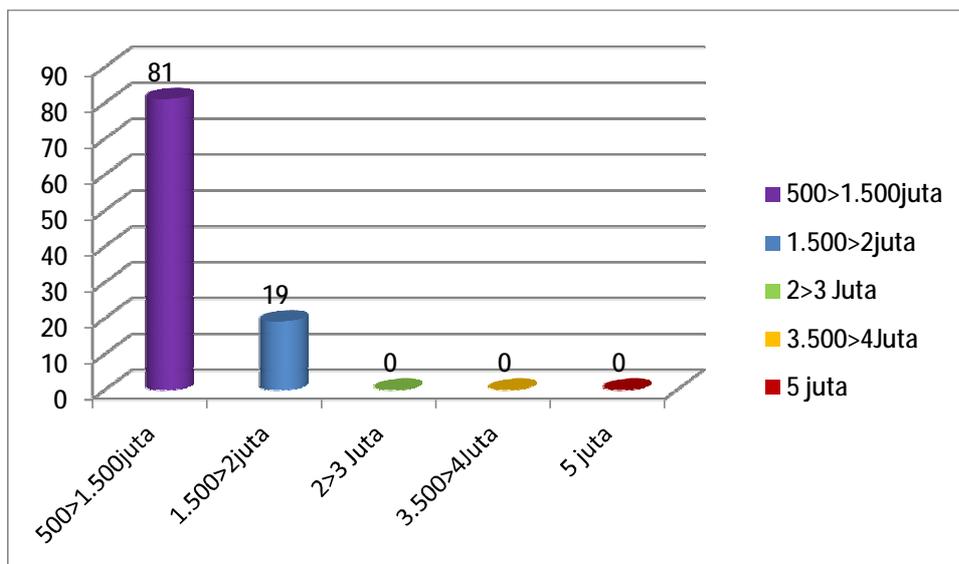


Dari data diatas 100 sampel Keluarga Penerima Manfaat(KPM) diatas maka kita bisa melihat bahwa status pendidikan nya lebih banyak adalah jenjang SD yaitu sebanyak 84 responden atau 84%, dan yang paling sedikit jenjang SMP adalah 16 responden atau 16% kepala rumah tangga (suami) sedangkan tamatan SMA tidak ada di karenakan pendidikan jaman dulu sangat kurang biaya bagi mereka yang bersekolah. Dimana pada penelitian ini saya juga bertanya tentang pendidikan orang tuanya yang laki-laki sehingga mereka tergerka hatinya supaya mereka tidak lalai menyekolahkan anaknya.

Rata-rata masyarakat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe ini tingkat pendidikannya masih sangat rendah maka dari itu pendamping Perogram Keluarga Harapan(PKH) inilah memberikan mereka arahan agar tetap memberikan semangat dan arahan kepada ibu-ibu yang menerima Program Keluarga Harapan(PKH) agar anak-anak mereka di sekolahkan agar mampu meningkatkan kualitas pendidikan yang di harapkan mampu memutuskan rantai kemiskinan kedepanya.

Gambar 4.4

Keluarga Penerima Manfaat Berdasarkan Penghasilan/Bulan



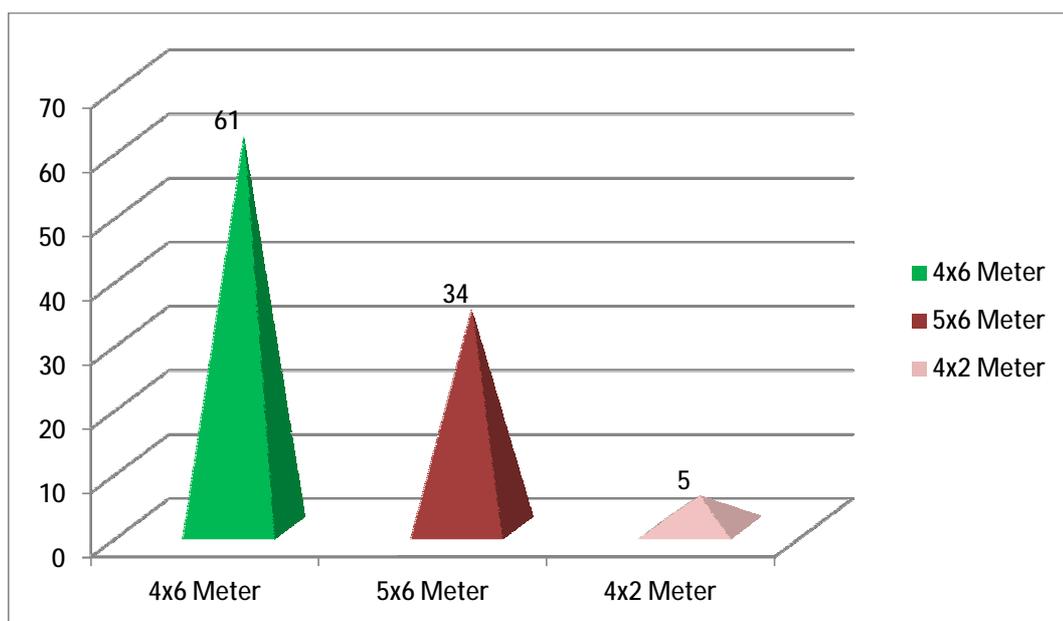
Dari data 100 sampel Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di atas maka kita dapat melihat bahwa jumlah penghasilan rumah tangga perbulanya lebih banyak Rp 500.000 > 1.500.000 sebanyak 81 responden atau 81 % dari 100 sampel, dan yang paling sedikit berjumlah 19 responden atau 19% yang mendapatkan penghasilan Rp 1.500.000 > 2.000.000 di karenakan penghasilan dari panen atau pekerjaan mereka setiap perbulanya sesuai dengan pendapatan rumah tangga. Dan penghasilan mereka pun lebih banyak bekerja paruh waktu di

ladang orang-orang. Selama penelitian yang dilakukan oleh peneliti, menurut peneliti pendapatan Keluarga Penerima Manfaat yang menjadi sampel ini sesuai dikatakan dengan Rumah Tangga Sangat Miskin(RTSM) Maka Keluarga Penerima Manfaat sesuai dengan kriterianya.

Pendapatan 2.000.000-5.000.000 tidak ada pendapatan mereka sebesar itu maka pendapatan 2.000.000-5.000.000 tidak ada responden yang pendapatanya/penghasilanya perbulan berjumlah tersebut.

Gambar 4.5

Luas Bangunan yang di Tempati KPM

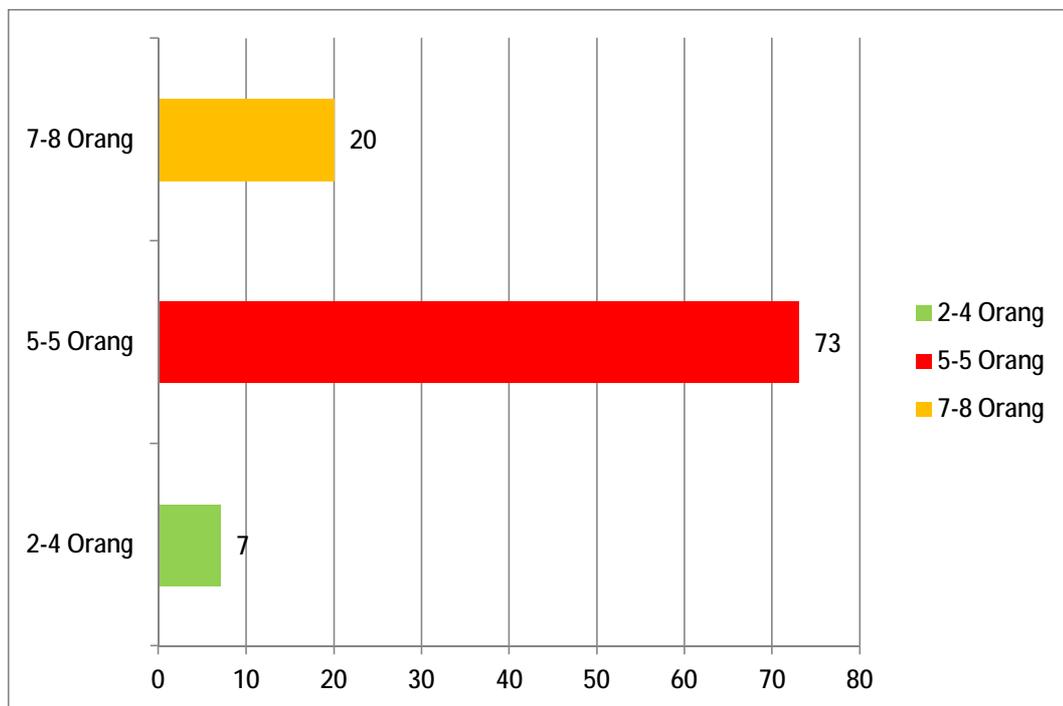


Dari data diatas dapat dilihat 100 sampel Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bahwa luas bangunan yang di tempati Keluarga Penerima Manfaat (KPM) paling banyak adalah berukuran 4x6 Meter sebanyak 61 responden atau 61% yang menempati luas bangunan tersebut, dan ukuran 5x6 Meter sebanyak 34 responden atau 34% yang paling sedikit adalah berukuran 4x2 Meter sebanyak 5 responden

atau 5%. Serta bangunan tersebut diberikan oleh orang tua atau warisan. Dan memberikan tanah kepada mereka berukuran 1 hektar atau 2 hektar sebagai warisan. Dimana pada penelitian ini saya mengajukan pertanyaan kepada responden apakah luas bangunan mereka lebar atau sempit maka si peneneliti berkesimpulan luas bangunan responden banyak yang berukuran lumayan besar.

Gambar 4.6

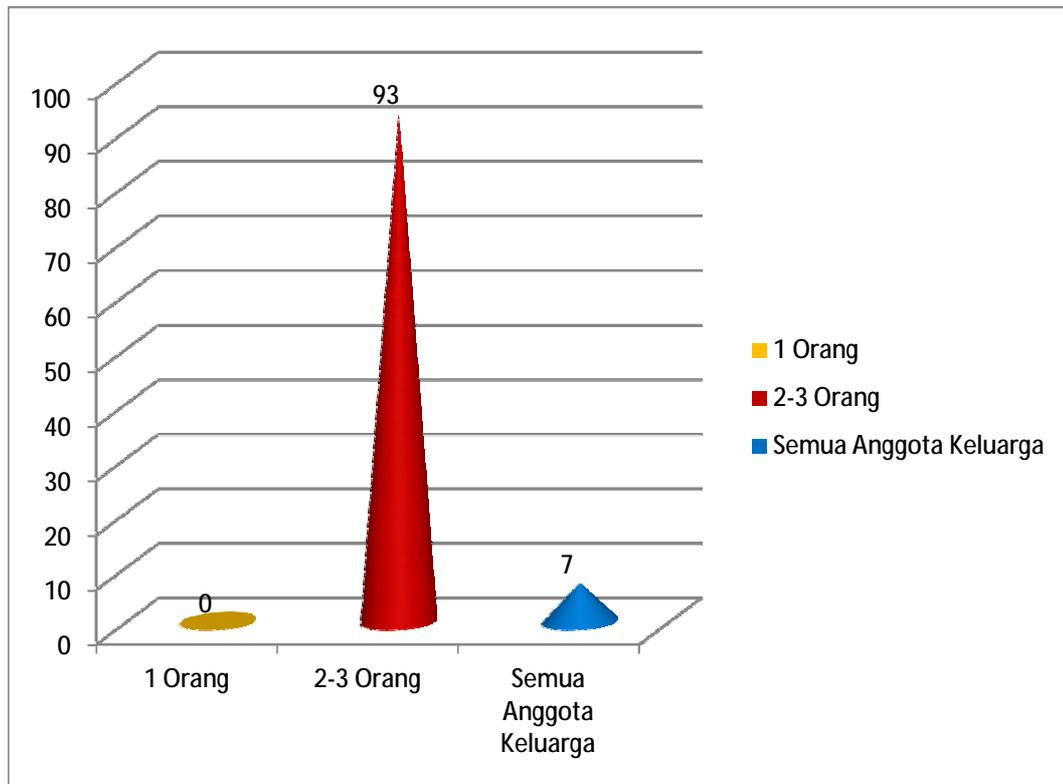
Jumlah Orang/Rumah Tangga Keluarga Penerima Manfaat



Dari tabel diatas dapat kita lihat 100 KPM bahwa jumlah orang dalam rumah tangga paling banyak 5-6 berjumlah 73 responden atau 73%, dan jumlah orang dalam rumah tangga yang 7-8 orang berjumlah 20 responden atau 20%, serta yang paling sedikit yaitu jumlah orang dalam rumah tangga 2-4 orang berjumlah 7 responden atau 7%. Dimana jumlah tanggungan yang paling banyak dalam satu rumah rata-rata 5-6 responden berjumlah 73 atau 73% ,karena rata-rata masyarakat masih banyak mempunyai anak.

Gambar 4.7

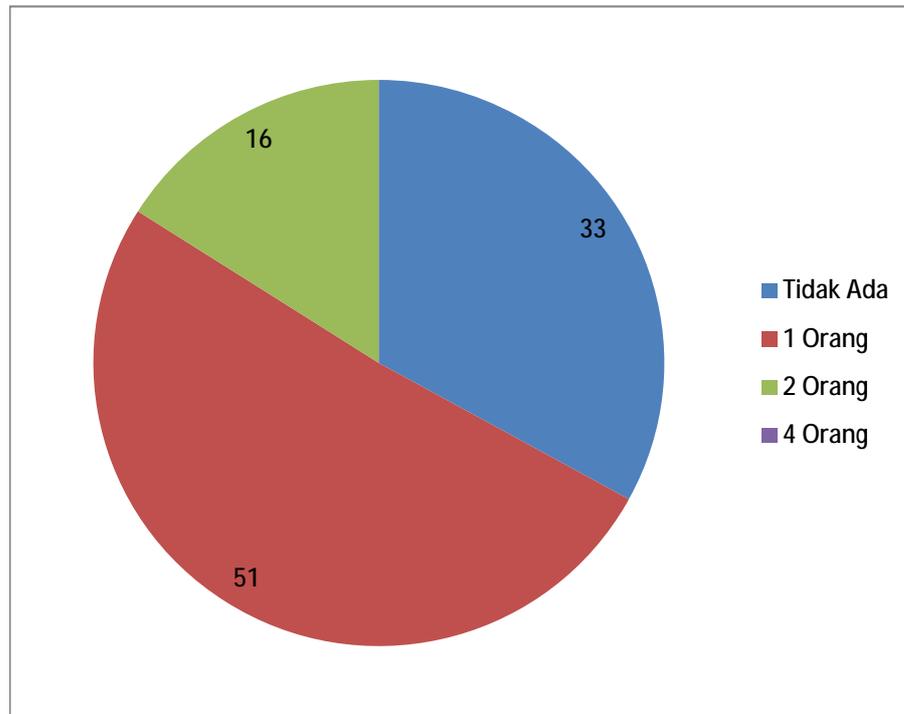
Jumlah Penerima PKH dalam Rumah Tangga



Dari data di atas dapat kita lihat 100 responden Keluarga Penerima Manfaat (KPM), jumlah penerima Perogram Keluarga Harapan (PKH) dalam rumah tangga yang paling banyak 2-3 orang sebanyak 93 responden atau 93% dan yang paling sedikit semua anggota rumah tangga sebanyak 7 orang atau 7% dimana pada semua anggota rumah tangga mendapatkan Perogram Keluarga Harapan (PKH) pada penelitian ini berjumlah 7 responden dikarenakan ibu rumah tangga dalam keadaan hamil dan berjumlah 1 orang yang mendapatkan Perogram Keluarga Harapan (PKH) pada penelitian ini tidak ada. Demikianlah peneliti menemukan sampel dalam penerima Perogram Keluarga Harapan (PKH) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Sitellu Tali Uarang Jehe.

Gambar 4.8

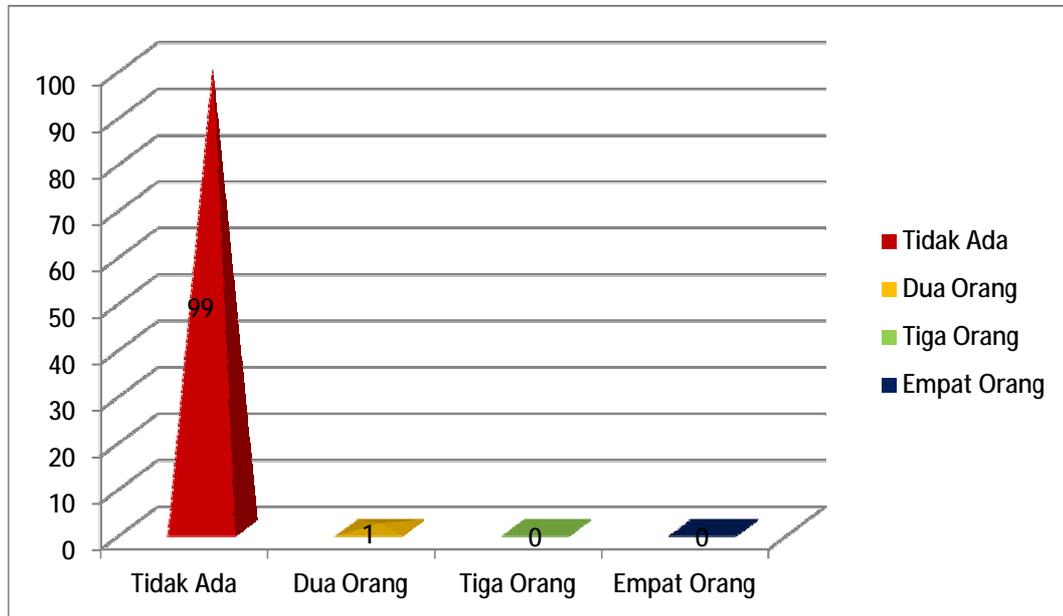
Jumlah Tanggungan anak SD Keluarga Penerima Manfaat (KPM)



Dari data diatas dapat kita lihat 100 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang paling banyak tanggungan anak SD berjumlah satu orang anak adalah berjumlah 51 responden atau 51%, tanggungan anak 2 orang SD sebanyak 16 responden atau 16%, dan jumlah tanggungan anak SD nya yang tidak ada berjumlah 33 orang atau 33% dimana pada 33 responden yang tidak memiliki tanggungan SD tetapi mereka mempunyai tanggungan anak balita 0-6 Tahun,ibu rumah tangga sedang hamil/nifas dan anak mereka sekolah SMP serta SMA sehingga mereka tidak mempunyai tanggungan anak SD. Serta tanggungan anak SD yang empat orang anak tidak ada yang memiliki tanggungan anak SD nya berjumlah tersebut. Demikianlah peneliti menemukan sampel dalam tanggungan anak SD Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Sitellu Tali Uarang Jehe.

Gambar 4.9

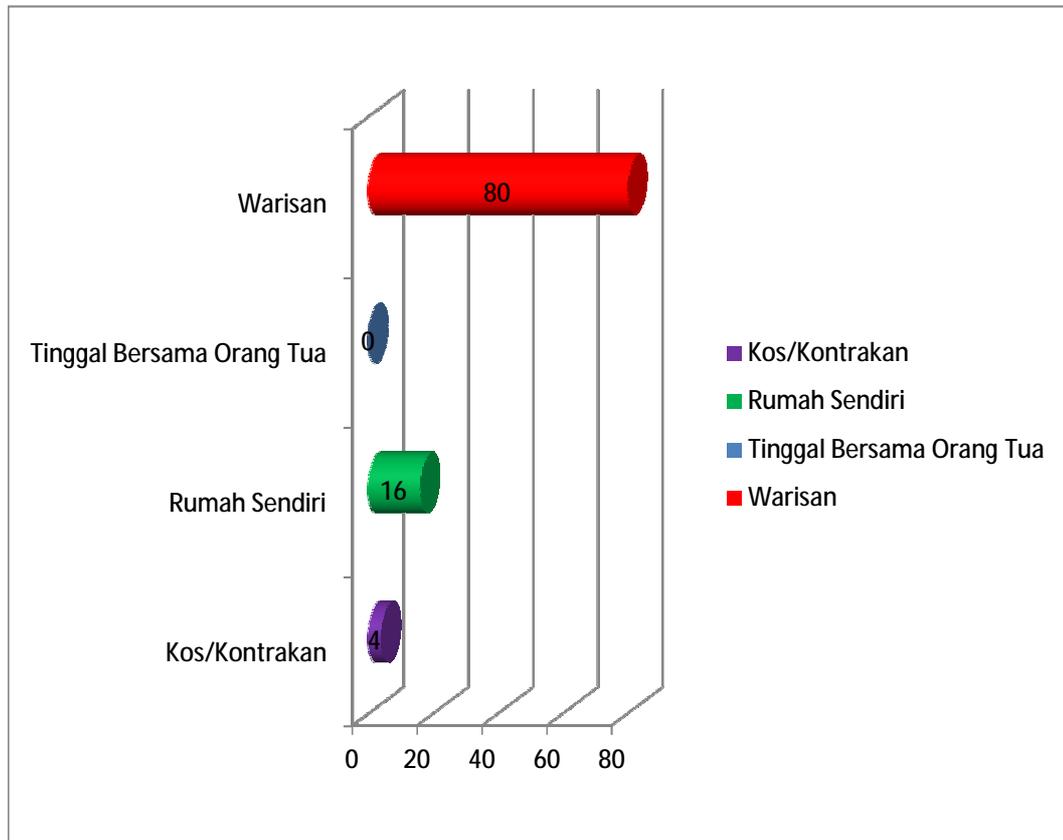
Tanggungans Lansia Keluarga Penerima Manfaat (KPM)



Dari data diatas dapat kita lihat 100 responden Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tanggungan lansianya adalah 1 responden atau 1% dimana pada tanggungan lansia ini berstatus suami istri, dan 99 responden 99% responden tidak mempunyai tanggungan lansia. Di Kecamatan Sitellu Tali Uarang Jehe lansia tidak mendapatkan PKH di karenakan lansia di biayai oleh anaknya sendiri secara bergiliran setiap minggu/setiap bulanya. Maka dari itu lansia kebanyakan hidup secara mandiri tidak tinggal se atap dengan anaknya yang sudah berkeluarga. Dua orang tanggungan lansia dalam 100 responden tidak ada begitu dengan tiga orang dan empat orang responden tidak ada tanggunya lansia. Demikianlah peneliti menemukan sampel dalam tanggungan Lansia Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Sitellu Tali Uarang Jehe.

Gambar 4.10

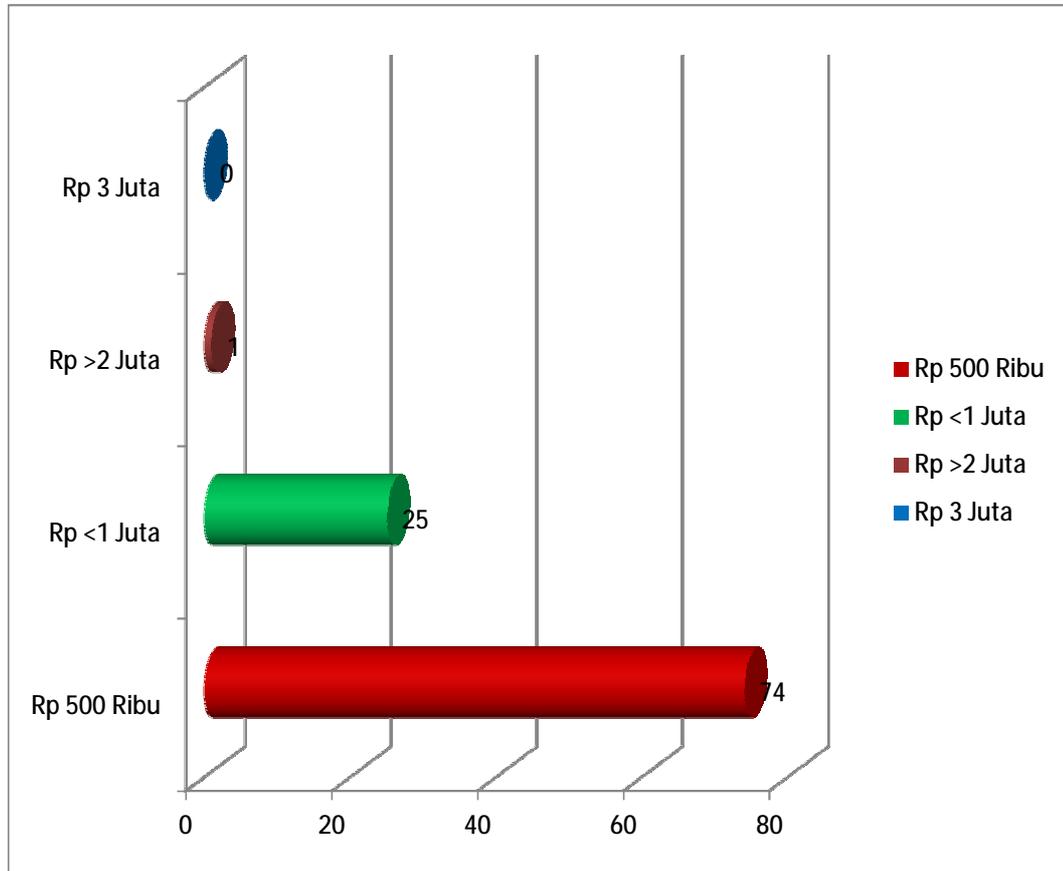
Status Kepemilikan Rumah Keluarga Penerima Manfaat



Dari data diatas dapat kita lihat status kepemilikan rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 100 responden status kepemilikan rumah mereka berjumlah 80 orang responden atau 80% rumah mereka adalah pemeberian orang tua atau warisan orang tua kepada anaknya, sedangkan rumah sendiri 16 orang responden atau 16% , dan mengontrak sebanyak 4 rumah tangga atau 4% dan tinggal bersama orang tua mereka tidak ada. Dimana pada Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe ini kebanyakan memperoleh rumah dari orang tuanya. Demikianlah peneliti menemukan sampel dalam status kepemilikan rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Sitellu Tali Uarang Jehe.

Gambar 4.11

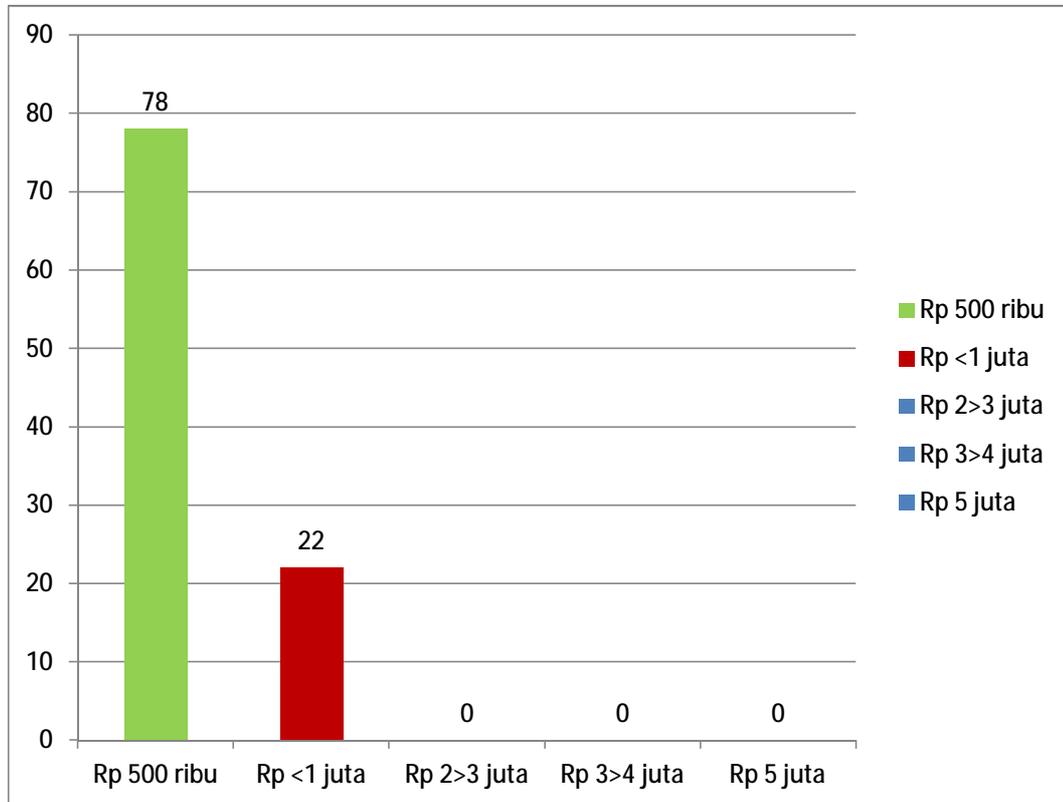
Keluarga Penerima Manfaat Dalam Menegeluarkan Biaya Pendidikan/Tahun



Dari data diatas dapat kita lihat 100 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai sampel bahwa biaya pendidikan Rp 500.000 berjumlah 74 responden atau 74%, biaya Rp < 1.000.000 berjumlah 25 responden atau 25%, dan Rp >2.000.000 berjumlah 1 responden atau 1%. Dari tabel diatas dapat di tarik kesimpulan mengapa biaya pendidikan sangat murah dikraenakan di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe tersebut banyak di bantu oleh pemerintah karena mereka dalam kondisi miskin. Demikianlah peneliti menemukan sampel dalam biaya pendidikan anak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe.

Gambar 4.12

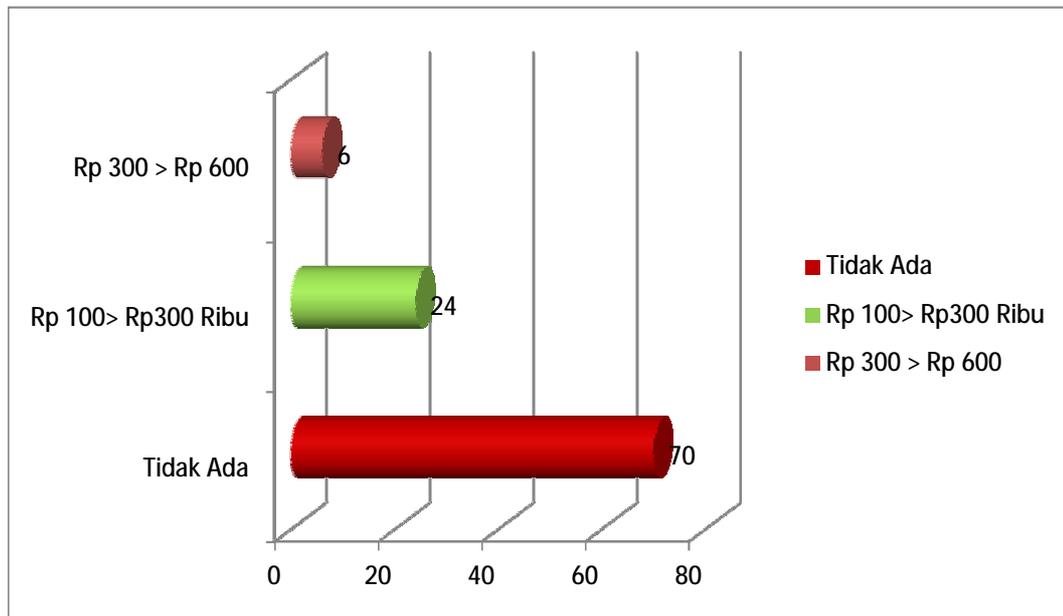
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Dalam Biaya Kesehatan/Tahun



Dari data 100 responden Keluarga Penerima Manfaat dapat kita lihat dalam biaya kesehatan pertahunnya paling banyak Rp 500.000 dengan 78 responden atau 78%, dan yang paling sedikit 22 responden atau 22% dengan biaya Rp <1.000.000 pertahunnya. Dari biaya kesehatan 2.000.000-5.000.000 tidak ada dikarenakan biaya kesehatan di Kecamatan Sitellu Tali Uarang Jehe banyak di bantu oleh puskesmas/pemerintah karena mereka kadang tidak mampu mereka dalam kondisi miskin. Demikianlah peneliti menemukan sampel dalam biaya pengeluaran kesehatan/tahun Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Sitellu Tali Uarang Jehe.

Gambar 4.13

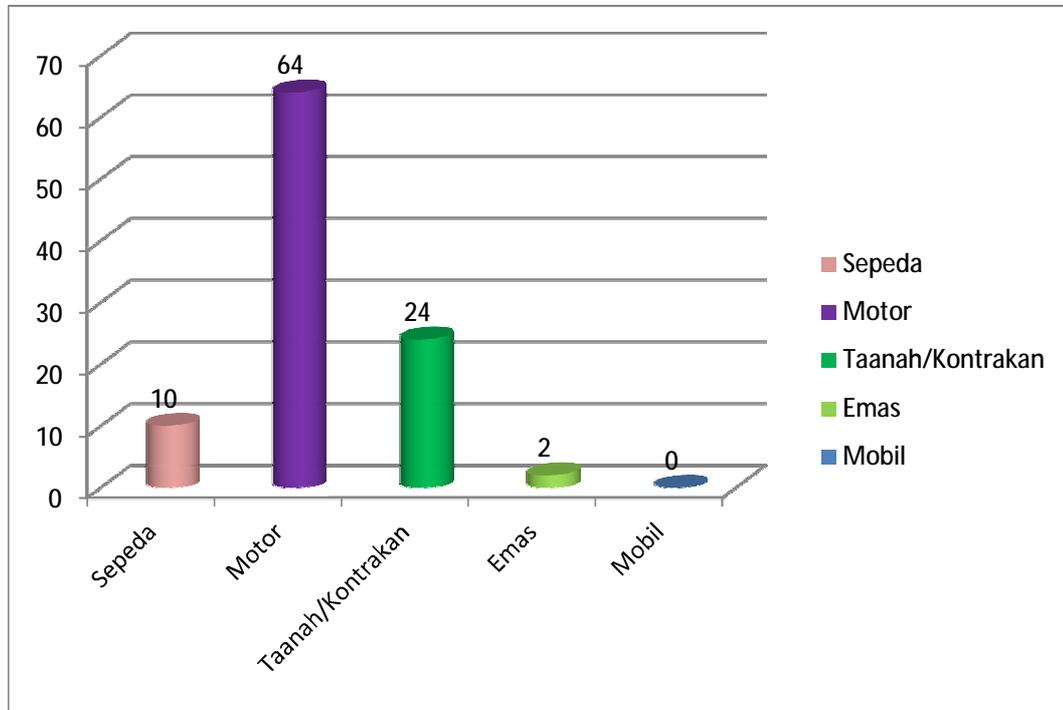
**Jumlah Tabungan Ibu Rumah Tangga Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
Dalam/Bulan**



Dari data diatas dapat dilihat 100 responden Keluarga Penerima Manfaat(KPM) di atas dapat kita lihat bahwa jumlah tabungan ibu rumah tangga dalam sebulan. 70 responden atau sebanyak 70% yang tidak memiliki tabungan sama sekali, dan 24 responden atau 24% memiliki tabungan sebesar Rp100.000>300.000 perbulanya, dan 6 responden atau 6% memiliki tabungan sebesar rp300.000>600.000 perbulanya. Dimana masyarakat di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe kebanyakan tidak memangang uang simpanan atau tabungan sama sekali dikarenakan pendapatan mereka pun perbulanya kadang tidak mencukupi dikarenakan harga kebutuhan sehari-hari mahal. Demikianlah peneliti menemukan sampel dalam jumlah tabunganya perbulan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe.

Gambar 4.14

Keluarga Penerima Manfaat Berdasarkan Kepemilikan Aset

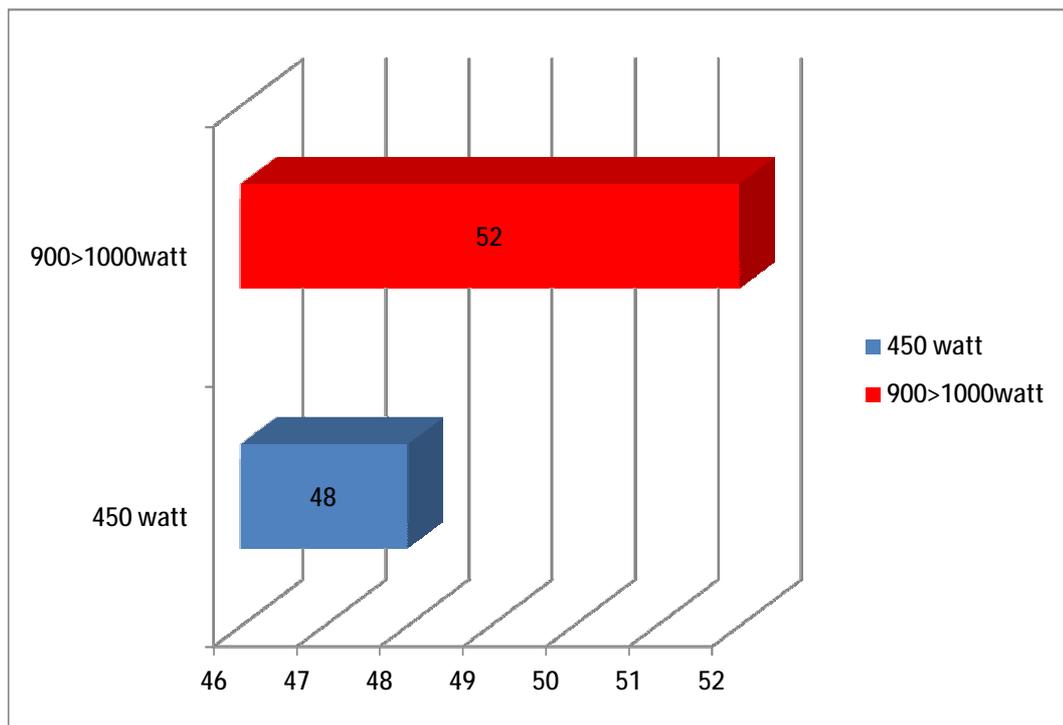


Dari data 100 sampel Keluarga Penerima Manfaat diatas dapat kita lihat bahwa kepemilikan aset motor berjumlah 64 responden atau 64% ,meiliki Tanah/kontrakan berjumlah 24 atau responden 24%, memiliki aset sepeda berjumlah 10 responden atau10%, dan yang terakhir kepemilikan asetnya adalah Emas berjumlah 2 sampel atau 2% dimana pada Perogram Keluarga Harapan ini jika memiliki emas mereka tidak akan mendapatkan PKH dikarenakan mereka masih mampu menghidupi kebutuhan mereka sehari-hari maka pada 2 responden ini tidak layak mendapatkan PKH meskipun pendapatan mereka di bawah rata-rata orang kaya serta rumah mereka yang belum terlalu bagus dan kepemilikan aset mobil tidak ada responden yang memiliki mobil .Demikianlah peneliti

menemukan sampel dalam kepemilikan aset Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Sitellu Tali Uarang Jehe.

Gambar 4.15

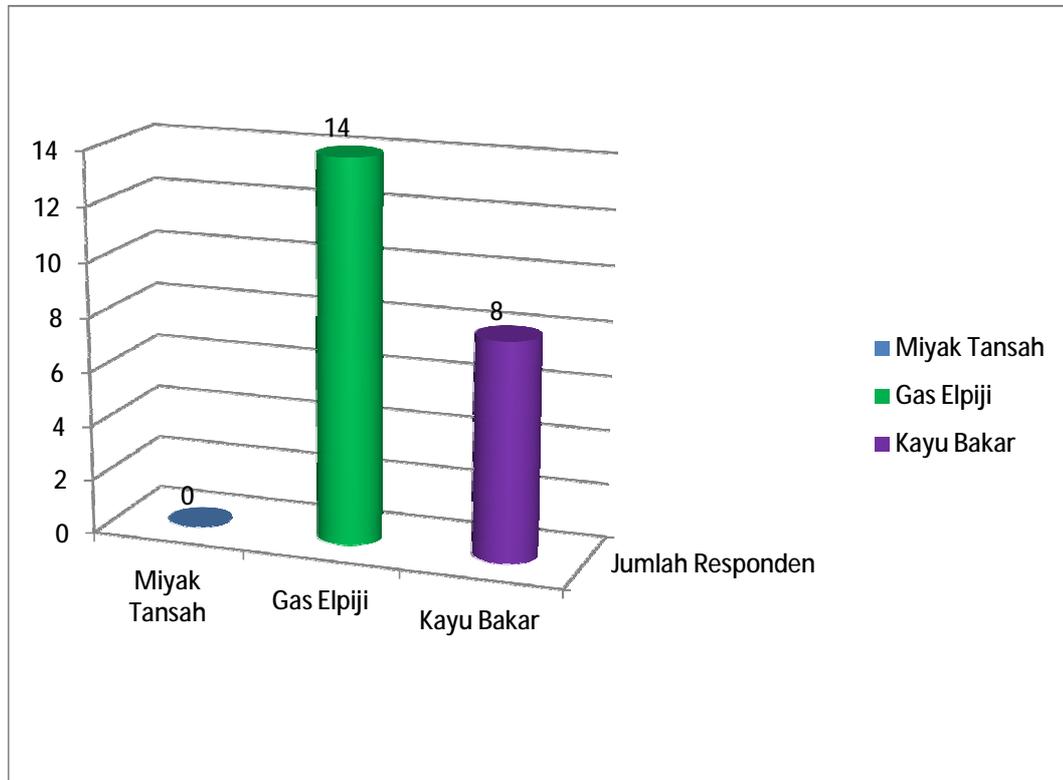
Keluarga Penerima Manfaat Berdasarkan Daya Listrik/RT



Dari data 100 responden Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diatas dapat kita lihat bahwa jumlah daya listrik per rumah tangga 450 watt dengan jumlah 48 responden atau 48% dan 900 > 1000 watt berjumlah 52 responden. Demikianlah peneliti menemukan responden dalam daya listrik dalam rumah tangga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Sitellu Tali Uarang Jehe.

Gambar 4.16

Keluarga Penerima Manfaat Berdasarkan Bahan Bakar Yang Di Gunakan Sehari-hari



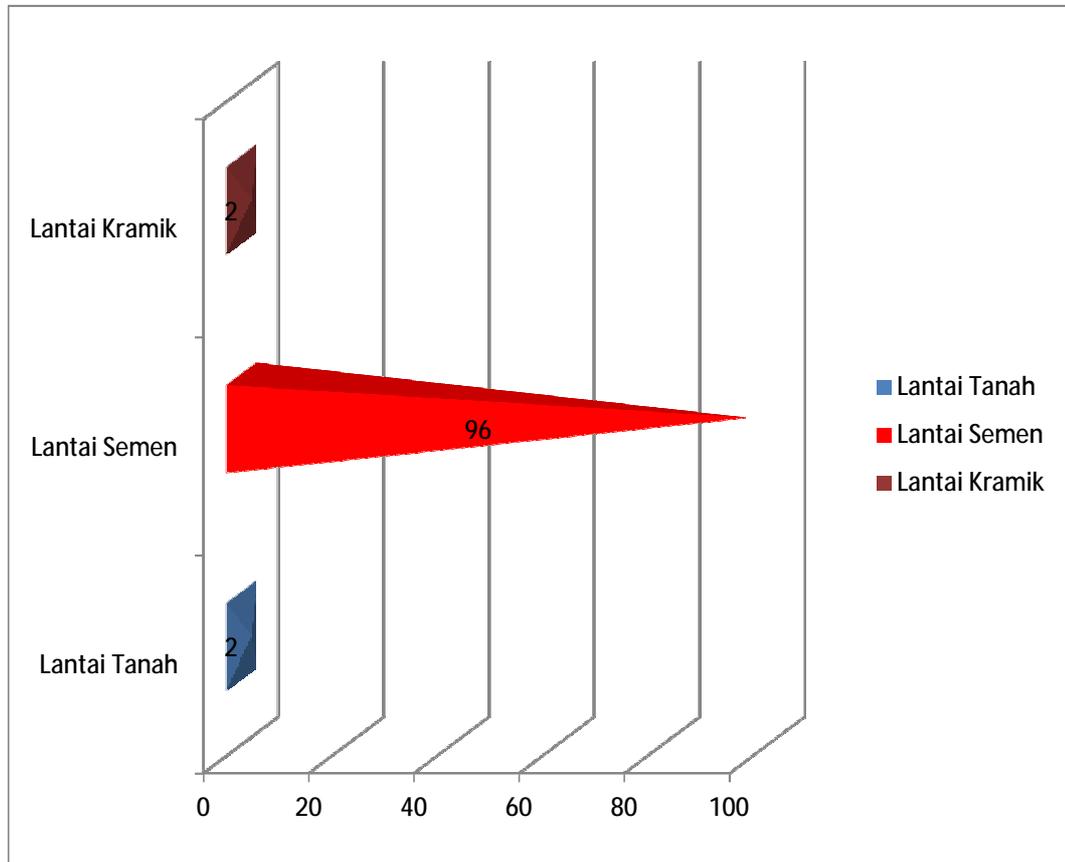
Dari data 100 sampel Keluarga Penerima Manfaat diatas dapat kita lihat bahan bakar yang digunakan sehari-hari untuk memasak. 86 responden atau 86% menggunakan kayu bakar untuk memasak dan gas elpiji berjumlah 14 responden atau 14% menggunakan gas elpiji untuk memasak setiap harinya dan apabila gas langka di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe mereka menggunakan kayu bakar juga untuk memasak sehari-harinya. Dan bahan minyak tanah untuk memasak sehari-hari tidak ada dikarenakan minyak tanah tidak ada di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe. Demikianlah peneliti menemukan responden bahan bakaran yang digunakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe.

4.2.2 Efektivitas Program PKH di Kecamatan Sitellu tali Urang Jehe

Untuk menjawab efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe tepat sasaran, Program Keluarga Harapan (PKH) hanya diberikan kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang datanya bersumber dari Kecamatan tersebut, jika dilihat dari bentuk fisik rumahnya tidak memadai seperti lantai rumahnya rusak dan kendaraan motor punseadanya ladang dan rumah 100 sampel itu hanya dikasih oleh orang tuanya sebagai warisan. Pendapatan mereka pun rata-rata Rp 500.000 > 1.000.000 /bulanya. Dan peneliti juga melihat mereka mempunyai banyak anak-anak sekolah sehingga para sampel banyak yang menerima subsidi lainya seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) ,Keluarga Indonesia Pintar (KIP). Peneliti juga berwawancara kepada masyarakat kenapa lansia tidak mendapatkan *Transfer Payment* Program Keluarga Harapan (PKH) mereka para lansia di biayai oleh anaknya secara berurutan perminggu atau dalam perbulan dikarenakan para lansia ingin hidup sendiri/hidup mandiri tidak ingin mau tinggal bersama anak-anaknya yang sudah berkeluarga maka dari itu lansia tidak mendapatkan PKH.

Gambar 4.17

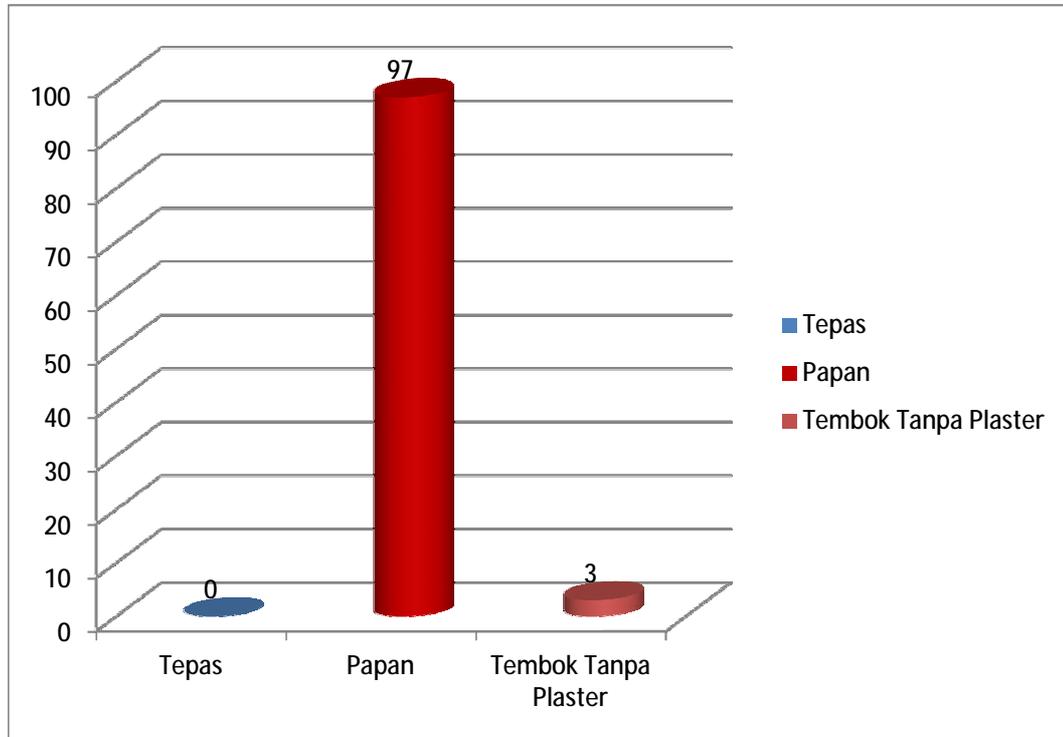
Keluarga Penerima Manfaat Berdasarkan Jenis Lantai Yang di Gunakan



Dari data 100 sampel diatas dapat kita lihat bahwa lantai yang digunakan yang penerima Perogram Keluarga Harapan (PKH) berlantaikan tanah berjumlah 2 responden atau 2%,dan lantai berjenis semen berjumlah 92 responden atau 92% , dan 2 atau 2% sampel menggunakan lantai kramik. Kesimpulanya paling banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menggunakan lantai semen yang murah. Maka dapat di tarik kesimpulan pada responden tersebut mereka sesuai kriteria Rumah Tangga Sngat Miskin (RSTM) yang telah di tentukan TNP2K.Demikianlah peneliti menemukan responden yang menggunakan jenis-jenis lantai yang digunakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Sitellu Tali Uarang Jehe.

Gambar 4.18

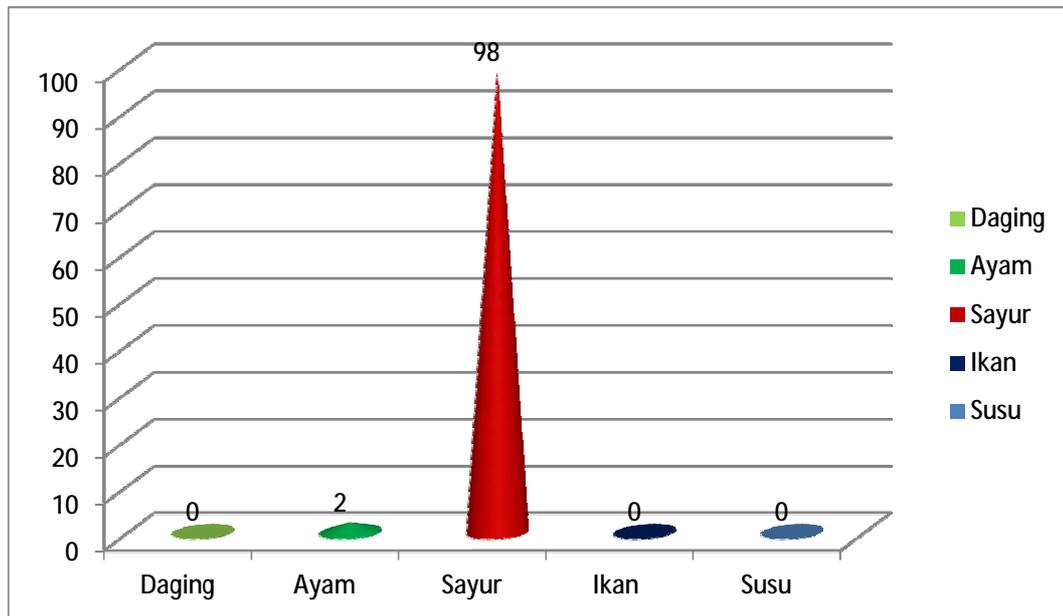
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Berdasarkan Jenis Dinding Yang di Gunakan



Dari data 100 responden diatas dapat kita lihat bahwa jenis dinding rumah yang digunakan penerima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah paling banyak berdinding papan berjumlah 97 responden atau 97%, dan yang menggunakan dinding tembok tanpa plaster berjumlah 3 responden atau 3% dan jenis dinding tepas yang digunakan responden tidak ada dikarenakan tepas di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe sudah langka. Maka dapat di tarik kesimpulan mereka sesuai kriteria RTSM yang telah di tentukan TNP2K. Demikianlah peneliti menemukan responden yang menggunakan jenis dinding dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe.

Gambar 4.19

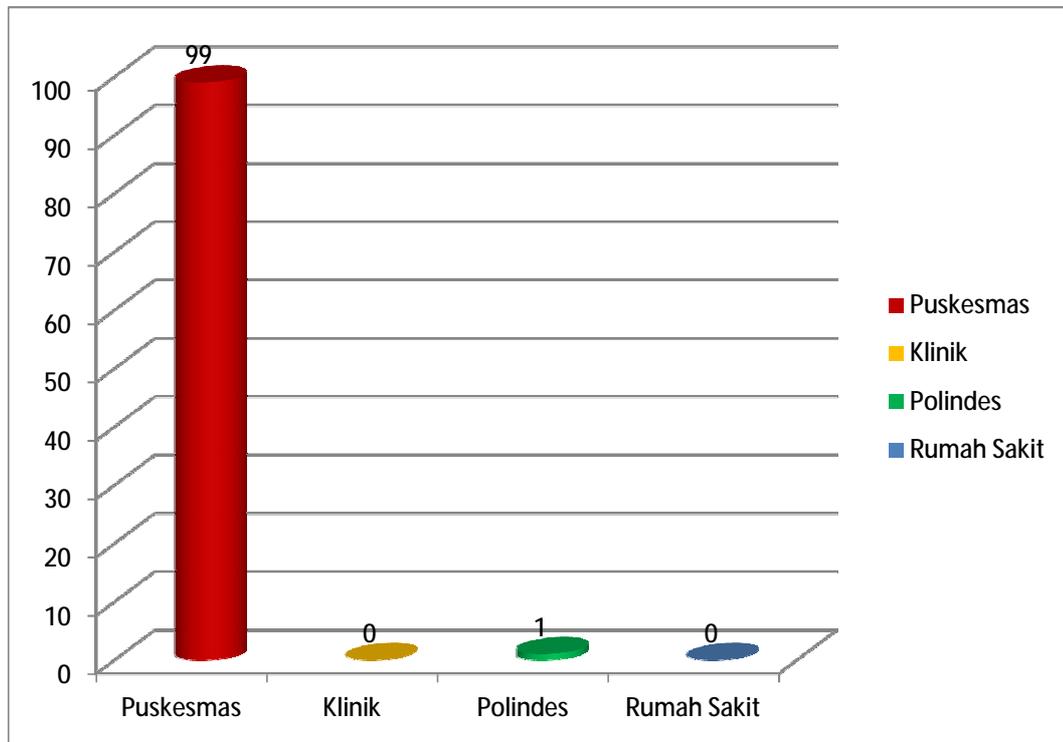
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Berdasarkan Komsumsi Makanan



Dari data 100 sampel diatas dapat kita lihat bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mengkonsumsi lauk sehari-hari kebanyakan sayur berjumlah 98 responden atau 98% dan 2 responden atau 2% lebih banyak mengkonsumsi lauk ayam setiap minggu. mengapa kebanyakan responden yang mengkonsumsi sayur dikarenakan mereka hanya mampu membeli sayur maka dapat disimpulkan memang benar adanya bahwa Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe kebanyakan berlaukkan sayur mayur dikarenakan dengan kondisi ekonomi mereka tidak memadai, yang mengkonsumsi ikan tidak ada responden, komsumsi daging pun tidak ada mereka hanya mampu membeli daging pada waktu lebaran saja dan yang mengkonsumsi susu pun tidak ada responden. Demikianlah peneliti menemukan komsumsi makan yang digunakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe.

Gambar 4.20

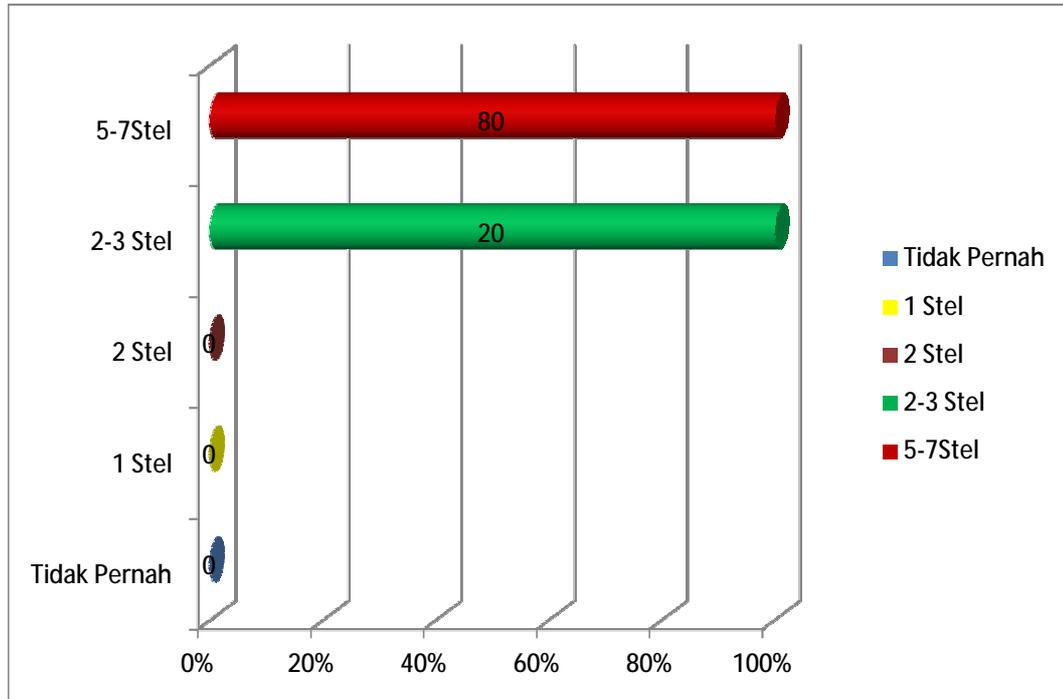
Keluarga Penerima Manfaat Berdasarkan Kemampuan Berobat



Dari data 100 sampel di atas dapat kita lihat bahwa kemampuan mereka berobat paling banyak di puskesmas berjumlah 99 responden atau 99% dikarenakan puskesmas di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe melayani yang Rumah Tangga Sangat Mekin(RTSM) dengan layanan secara gratis, dan 1 sampel berobat ke polinden dikarenakan rumahnya dekat dengan polindes tersebut, yang berobat diklinik tidak ada responden begitu juga dengan rumah sakit dikarenakan kalau mereka tidak sakit parah mereka tidak menggunakan rumah sakit sebagai tempat berobat dan rumah sakit pun jauh dari Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe. Demikianlah peneliti menemukan responden dalam kemampuan berobat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Sitellu Tali Uarang Jehe.

Gambar 4.21

Keluarga Penerima Manfaat Berdasarkan Kemampuan Membeli Pakaian/Tahun

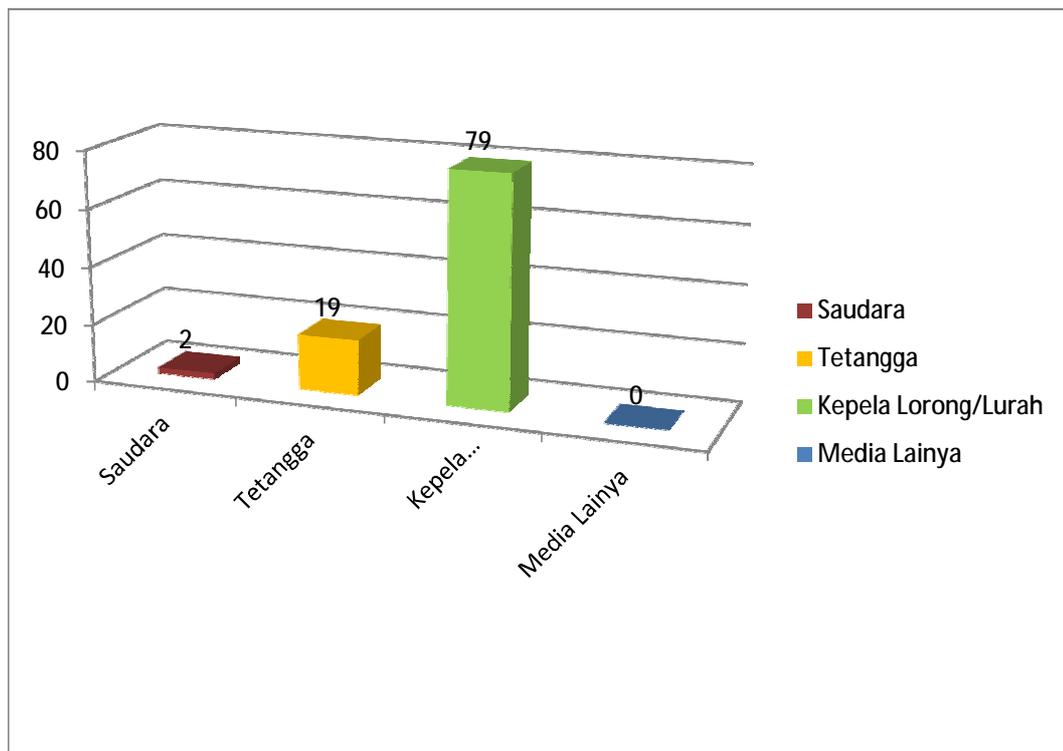


Dari data 100 sampel diatas dapat kita lihat KPM kemampuannya membeli pakaian dalam pertahun. 3-4 stel berjumlah 20 responden atau 20% kemampuannya untuk membeli baju pertahunnya dan 5-7 stel berjumlah 80 responden atau 80% yang mampu membeli baju dalam pertahunnya. Kesimpulanya saya sebagai peneliti dan keadaan di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe memang benar mereka Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) hanya mampu membeli baju pada saat mau lebaran saja, yang membeli pakain satu stel tidak ada responden, dua stel pun tidak ada responden yang membeli pakaian begitu juga dengan tidak pernah membeli baju sama sekali dikarenakan mereka mempunyai anggota keluarga lebih dari dua orang dalam satu rumah. Demikianlah

peneliti menemukan responden berdasarkan kemampuan mereka membeli baju dalam setahun yang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe.

Tabel 4. 22

Keluarga Penerima Manfaat Berdasarkan Informasi yang di Dapatkan Tentang PKH

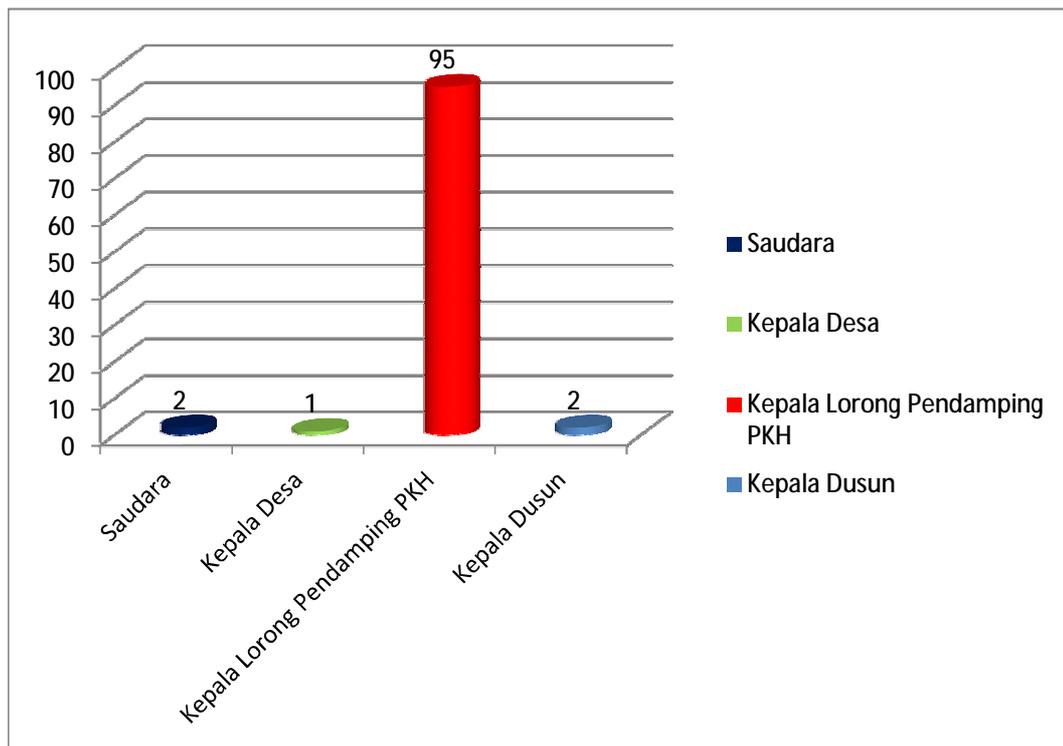


Dari data 100 responden diatas dapat dilihat bahwa informasi yang di dapatkan tentang PKH yang paling banyak adalah kepala lorong atau lurah berjumlah 79 responden atau 79%, serta informasi yang didapatkan tentang PKH dari tetangganya sendiri berjumlah 19 responden atau 19% dan yang ketiga mendapatkan informasi dari saudaranya berjumlah 2 responden atau 2%. dimana kepala lorong atau lurah yang dekat dengan masyarakat di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe dan informasi dari media lainnya tidak ada responden yang didapatkan tentang Perogram Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sitellu Tali Urang

Jehe. Demikianlah peneliti berdasarkan informasi yang didapatkan tentang PKH Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Sitellu Tali Uarang Jehe.

Gambar 4.23

Keluarga Penerima Manfaat Berdasarkan Seleksi Mendapatkan PKH

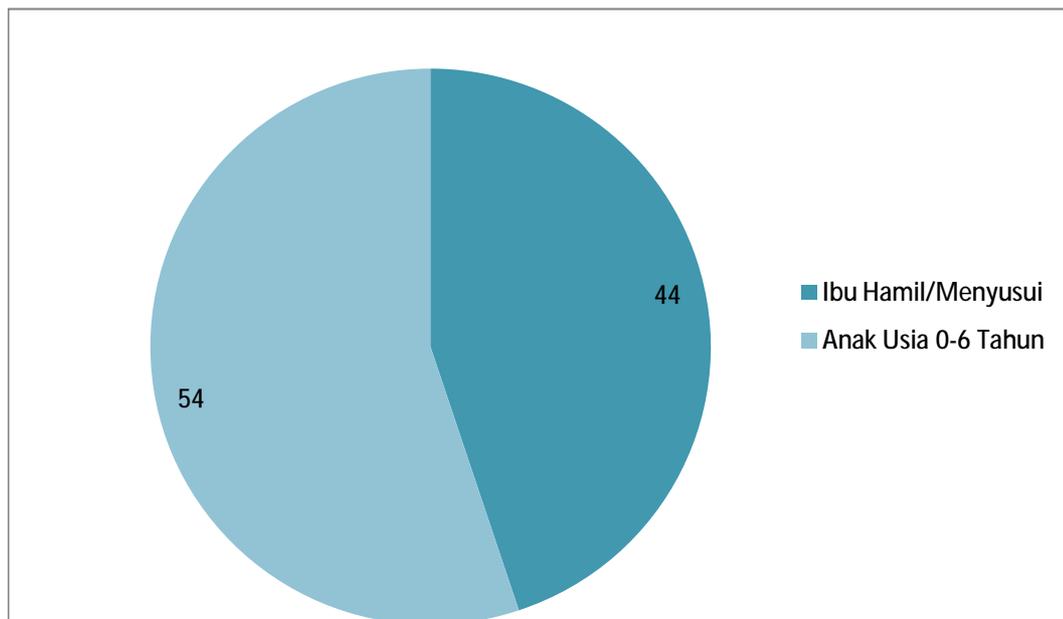


Dari data 100 sampel diatas dapat kita lihat bahwa cara seleksi mendapatkan PKH berdasarkan seleksi pendamping Perogram Keluarga Harapan (PKH) berjumlah 95 responden atau 95%, 2 responden atau 2% di seleksi oleh saudaranya karena kebetulan masih bersaudara dengan pendamping Perogram Keluarga Harapan (PKH), 3 responden atau 3% diseleksi oleh kepala desa bahwa dia berhak menerima Perogram Keluarga Harapan (PKH), 2 responden atau 2% diseleksi oleh kepala dusun dikarenakan dia juga berhak mendapatkan Perogram Keluarga Harapan (PKH). Demikianlah peneliti menemukan berdasarkan selesksi

untuk mendapatkan PKH dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Sitellu Tali Uarang Jehe.

Gambar 4.24

Keluarga Penerima Manfaat Berdasarkan Kesehatan



Dari data di atas dapat kita lihat bahwa dalam komponen kesehatan ibu hamil/menyusui berjumlah 44 responden atau 44% dan berdasarkan komponen kesehatan anak usia 0-6 tahun berjumlah 54 responden atau 54%. 2 responden atau 2% lagi peneliti tidak membuat angka ditabel tersebut dikarenakan 2 responden tidak memiliki komponen kesehatan ibu hamil/menyusui dan anak usia 0-6 tahun di Kecamatan Sitellu Tali Uarang Jehe. Demikianlah peneliti menemukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan komponen kesehatan dalam kriteria TNP2K di Kecamatan Sitellu Tali Uarang Jehe.

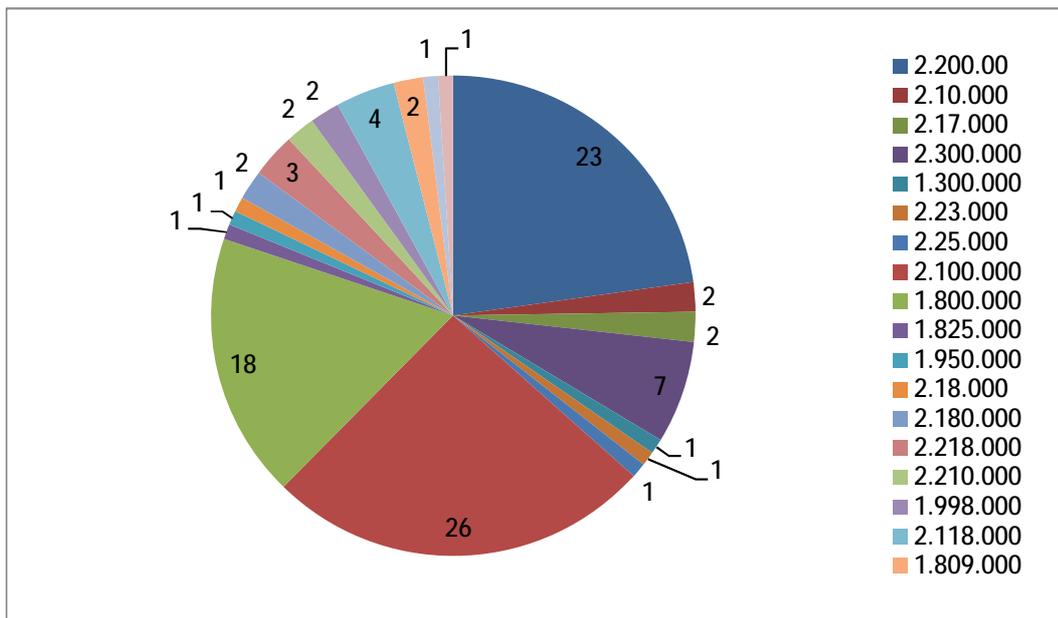
Tabel 4.4**Dana PKH Yang Diterima Masyarakat/RT**

Dana PKH yang diperoleh dalam keluarga	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
2.200.00	23	19%
2.10.000	2	2%
2.17.000	2	2%
2.300.000	7	2%
1.300.000	1	1%
2.23.000	1	1%
2.25.000	1	1%
2.100.000	26	26%
1.800.000	18	18%
1.825.000	1	1%
1.950.000	1	1%
2.18.000	1	1%
2.180.000	2	1%
2.218.000	3	3%
2.210.000	2	2%
1.998.000	2	2%
2.118.000	4	4%
1.809.000	2	1%
1.900.000	1	1%
1.825.000	1	1%

Penjelasan dan gambarnya dapat dilihat di bawah ini.

Gambar 4.25

Dana PKH Yang Diterima Masyarakat/RT



Dari data 100 sampel Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diatas maka kita bisa melihat bahwa jumlah anggota keluarga dalam rumah tangga yang menerima *transfer payment* (subsidi) dalam rupiah pada desember 2018 yang saya teliti. Rp2.200.000 berjumlah 23 responden atau 23% yang mendapatkan *transfer payment* (subsidi), Rp2.10.000 berjumlah 2 responden atau 2% yang mendapatkan *transfer payment* (subsidi), Rp2.17.000 berjumlah 2 responden atau 2% yang mendapatkan *transfer payment* (subsidi), Rp2.300.000 berjumlah 7 responden atau 7% yang mendapatkan *transfer payment* (subsidi), Rp1.300.000 berjumlah 1 responden atau 1% yang mendapatkan *transfer payment* (subsidi), Rp2.23.000 berjumlah 1 responden atau 1% yang mendapatkan *transfer payment* (subsidi), Rp2.25.000 berjumlah 1 responden atau 1% yang mendapatkan *transfer payment* (subsidi), Rp2.100.000 berjumlah 26 responden atau 26% yang mendapatkan *transfer payment* (subsidi), Rp1.800.000 berjumlah 18 responden atau 18% yang

mendapatkan *transfer payment* (subsidi),Rp1.825.000 berjumlah 1 responden atau 1% yang mendapatkan *transfer payment* (subsidi),Rp 1.950.000 berjumlah 1 responden 1% yang mendapatkan *transfer payment* (subsidi),Rp2.18.000 berjumlah 1 responden atau 1% yang mendapatkan *transfer payment* (subsidi),Rp2.180.000 berjumlah 2 responde atau 2% yang mendapatkan *transfer payment* (subsidi),Rp 2.218.000 berjumlah 3 responden atau 3% yang mendapatkan *transfer payment* (subsidi),Rp 2.210.000 berjumlah 2 responden atau 2% yang mendapatkan *transfer payment* (subsidi),Rp 1.998.000 berjumlah 2 responden atau 2% yang mendapatkan *transfer payment* (subsidi), Rp2.118.000 berjumlah 4 responden atau 4% yang mendapatkan *transfer payment* (subsidi),Rp 1.809.000 berjumlah 2 responden atau 2% yang mendapatkan *transfer payment* (subsidi), Rp1.900.000 berjumlah 1 responden 1% yang mendapatkan *transfer payment* (subsidi),Rp 1.825.000 berjumlah 1 responden atau 1% yang mendapatkan *transfer payment* (subsidi). Diman pada penelitian ini mereka tidak rata mendapatkan jumlah nominalnya *transfer payment* dikarenakan mereka di berikan sesuai dengan tanggungan masing-masing dan responden lain juga menyatakan ada juga sebelum mendapatkan bantuan di desember 2018 mereka juga mendapatkan biaya lebih sehingga pada desember 2018 pencairan mereka mendapatkan jumlah uang yang rendah sebagai wawancara sipeneliti.Demikianlah peneliti menemukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan jumlah uang yang diterima RT di Kecamatan Sitellu Tali Uarang Jehe.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat di ambil beberapa kesimpulan,antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan terhadap 100 sampel di Kecamatan sitellu Tali Urang Jehe Keluarga Penerima Manfaat penurunan kemiskinannya sudah baik, hal ini terlihat dari anak Keluarga Penerima Manfaat usia sekolah yang sudah terdaftar dan mengikuti kehadiran sekolah 85% serta partisipasi kesadaran ibu hamil/menyusui dan mempunyai anak balita untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin sehingga anak-anak mereka tidak terserang gizi buruk serta anaknya kelak memutuskan rantai kemiskinan.
2. Efektifitas dari perogram PKH di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe dari 100 sampel Keluarga Penerima Manfaat mereka/masyarakat yang menerima PKH sesuai dengan kriteria yang di tentukan oleh TNP2K dimana dituliskan di TNP2K rumah masyarakat masih banyak yang berdinding papan, lantai rumah mereka terbuat dari semen yang murah sehingga lantai rumah sampel rusak diberbagai segi lantai-lantai, Keluarga Penerima Manfaat juga banyak yang menggunakan kayu bakar untuk memasak setiap hari dan air minum yang mereka konsumsi pun dimasak sendiri, serta makanan/lauk yang dimakan kebanyakan sayur-sayur. Maka dari itu Keluarga Penerima Manfaat sesuai dengan kriteria Rumah Tangga Sangat Miskin yang di tentukan oleh TNP2K. Peneliti juga melihat dan

wawancara langsung terhadap masyarakat bahwa kemiskinan mereka dapat menurun dengan adanya PKH di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe dalam tiga desa sebagai sampel sipeneliti.

3. Dalam 3 desa yang diteliti 100 sampel, mereka banyak yang mendapatkan bantuan yang double seperti KIS, KIP dan RASTRA (Bulok) dikarenakan mereka mempunyai rata-rata jumlah anaknya cukup banyak mulai dari usia 0-6 Tahun, mempunyai tanggungan SD, SMP dan SMA sehingga mereka mendapatkan Transfer Paymentnya double. Tetapi seharusnya itu dibagi ke masyarakat yang lain sehingga bantuan pemerintah rata-rata mendapatkannya dikarenakan di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe masih banyak yang tergolong miskin.

5.2 Saran

1. Bagi Pemerintah harus lebih banyak memberikan bantuan di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe karena masih banyak masyarakat yang belum terbantu dikarenakan ekonomi mereka rendah dan harga jual panen pun merosot sehingga mereka juga merasakan kemiskinan. Serta PKH lebih banyak di salurkan lagi di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pak-Pak Bharat SUMUT.
2. Bagi masyarakat Keluarga Penerima Manfaat supaya menyadarkan mereka agar tidak selalu bergantung pada terhadap bantuan-bantuan pemerintah.
3. Bagi pendamping PKH harus memerhatikan bantuan yang diberikan pemerintah sehingga masyarakatnya tidak mendapatkan bantuan yang double.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan pusat Statistik Indonesia (2018). *Sistem Targeting Program Keluarga Harapan*
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pak-Pak Bharat. *Sosial dan Kependudukan*. Di akses pada tanggal 30 desember 2018
- Dartanto Teguh. Kompas. *Upaya Promotif dan Preventif Harus Inovatif*. 20 Desember 2018
- Dumary,(1995) *Prekonomian Indonesia*, Jakarta: Penerbit Erlangga
- Dinas Sosial Kabupaten Pak-Pak Bharat Februari 2019
- Sumudinigrat Gunawan (1999) *Jaring Pengaman Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat*.Indonesia
- Hariyati Sonia (2018) *Dampak Kebijakan Pemerintah Akan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan TerjunMedan Marelan*
- <http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/09/pengertian-kesejahteraan> (pada tanggal 16 Januari 2019).
- Jhingan M.L (2010) *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta Penerbit: PT Rajagrafindo Persada
- Verner, 2006 Pengertian Kemiskinan, E-Jurnal
- Kementrian Sosial..” *Sistem Targeting Program Keluarga Harapan*”www.kemensos.go.id di akses pada tanggal 11 desember 2018
- Kuncoro, Mudrajat (2013). *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*, Jakarta: Erlangga
- Todaro dan Stephen (2011). *Pembangunan Ekonomi Edisi Sebelas*. Ciracas, Jakarta: Penerbit Erlangga
- Mangkoesebroto, Guritno (1993). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFYOGYAKARTA
- Nordhaus, Samuelson (2003). *Ilmu Mikro Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Media
- Pak-Pak Bharat Dalam Angka 2017 di Akses pada tanggal 28 februari 2019

- Sukirno, Sadono (2004). *Makro Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Suprayitno, Bambang (2017). *Ekonomi Publik*. UPP STIM YKPN
- Riffaisal, Irwan (2016) *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi Bantuan Langsung Tunai*. Universitas Muhammadiyah Makasar
- Richard, Peggy (1993) *Keuangan Negara Dalam Teorid Dan Praktek Edisi Kelima*. Jakarta: Penerbit Elangga
- Sahib Munawwar (2016). *Pengaruh Kebijakan Perogram Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*